

**ANALISIS PERILAKU TIDAK MEMILIH (*Non-Voting Behavior*)
PADA PILKADA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020
(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Purwodadi)**

SKRIPSI

Program Studi S-1 Ilmu Politik



Disusun oleh

Riqi Andika

NIM: 1906016029

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo

Semarang di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Riqi Andika

NIM : 1906016029

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi: Analisis Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting Behavior) Pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Purwodadi)

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Desember 2023

Pembimbing



(Tika Ifrida Takayasa, M.A)
NIP. 198811152019032018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PERILAKU TIDAK MEMILIH (*Non-Voting Behavior*) PADA PILKADA
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020

(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Purwodadi)

Disusun Oleh:

Riqi Andika

1906016029

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal

20 Desember 2023 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

Ketua



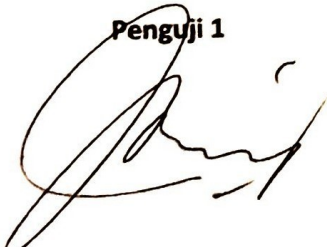
Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

Sekretaris



Tika Irida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

Penguji 1



Dr. Rofiq M, Si
NIP. 197303052023211007

Pembimbing



Tika Irida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 7 September 2023



NIM: 1906016029

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Tak lupa shalawat dan salam selalu kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PERILAKU TIDAK MEMILIH (Non-Voting Behavior) PADA PILKADA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Purwodadi)”.

Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Studi S-1 pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. yang telah memberikan banyak arahan, ilmu, dan nasehat selama penulis menimba ilmu pada program studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.
4. Dosen pembimbing Tika Ifrida Takayasa, M.A dan dosen wali Muhammad Mahsun, M.A., yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan pengarahan dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmuyang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Margono dan Ibu Samiyem, Adik tercinta Reno Adi Saputra dan Rangga Aditya, yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta

dukungan, semangat baik dari segi moral maupun material yang tidak ternilai harganya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

8. Bapak Saronu selaku Ketua PPS Kelurahan Purwodadi yang telah bersedia dijadikan narasumber, serta menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik serta lancar.
9. Seluruh narasumber yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang bersedia dijadikan narasumber dan berbagi informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
10. Teman-teman seperjuangan penulis Miftah, Rizal, Igun, Rachman, Guyub, Hambali, Tanto, Sofyan, Chandra, Faud, Julian, Aji, dan seluruh pengurus PP kontrakan beringin ceria. Terimakasih telah menemani hari-hari penulis selama menjalani kehidupan perantauan di Semarang serta dukungan, nasehat dan *trigernya*, semoga silaturahmi dan pertemanan dapat terus terjalin dan sukses selalu untuk kita semua. Aamiin.
11. Teman-teman Ilmu Politik A dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik 2019 yang telah memberikan keceriaan dan semangat bagi penulis, Semoga Allah meridhoi langkah kita menuju sukses. Aamiin.
12. Teruntuk seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan penyelesaian skripsi ini. Dengan segala hormat dan ucapan syukur penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Semarang, 6 Desember 2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riqi Andika', written over a horizontal line.

Riqi Andika

NIM: 1906016029

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT

Saya mempersembahkan karya tulis ini kepada orang tua tercinta Bapak Margono dan Ibu Samiyem yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dukungan dalam segala hal baik materil maupun non materil, yang tidak pernah lelah mendoakan dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan.

MOTTO

“A man is but the product of his thoughts and what he thinks he becomes.”

_Mohandas Karamchand Gandhi

ABSTRAK

Kelurahan Purwodadi merupakan daerah yang memiliki tingkat golput paling tinggi pada saat Pilkada 2020 di Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab tingginya tingkat golput dan faktor yang menjadi pengaruh adanya golput di Kelurahan Purwodadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengacu pada teori *Rational Choice* dan juga Teori *Non-voting Behavior*. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa tingginya tingkat golput di Kelurahan Purwodadi disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19, dimana hal tersebut didominasi oleh pilihan rasional teknis yang didasari karena adanya pertimbangan akibat kecemasan yang dialami oleh pemilih, dan juga adanya pilihan rasionalitas ekonomis yang menjadi pertimbangan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, dimana adanya sikap irasionalitas didalam sikap tidak memilih dikarenakan adanya mengikuti teman ataupun keluarga terdekat mereka. Terdapat faktor sosial yang menjadikan pemilih melakukan *non-voting behavior*, dimana banyaknya faktor sosial yang menjadikan hal tersebut dapat terjadi serta pemilih di Kelurahan Purwodadi dipengaruhi oleh jenis golput teknis yang disebabkan oleh Covid-19, serta yang kedua adanya jenis golput politis yang mempengaruhi perilaku *non-voting behavior* pemilih di Kelurahan Purwodadi. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pilihan rasionalitas teknis yang mendominasi pemilih rasional di Kelurahan Purwodadi dan juga jenis golput teknis yang menjadi jenis golput paling banyak di Kelurahan Purwodadi.

Kata Kunci: Rational Choice, Non-Voting Behavior, Kelurahan Purwodadi

ABSTRACT

The Purwodadi Sub-district is an area that had the highest level of abstention (non-voting) during the 2020 Regional Elections in Grobogan Regency. The research aims to identify the causes of this high abstention rate and the factors influencing abstention in the Purwodadi Sub-district. The methodology employed in this research is qualitative research. This study refers to the Rational Choice theory and the Theory of Non-voting Behavior. The findings of this research indicate that the high rate of abstention in Purwodadi Sub-district is caused by the Covid-19 pandemic. This circumstance is predominantly influenced by technically rational choices driven by considerations arising from the anxiety experienced by voters. Additionally, there is a consideration of economic rationality that contributes to voters refraining from exercising their voting rights. Furthermore, irrational behavior in not casting votes is observed due to peer or family influence. Social factors also play a significant role in inducing non-voting behavior among voters. The multitude of social factors contributes to this phenomenon. Voters in Purwodadi Sub-district are affected by a form of technical abstention caused by Covid-19, and secondly, there exists a form of political abstention influencing non-voting behavior among voters in Purwodadi Sub-district. In conclusion, the dominance of technically rational choices among rational voters in Purwodadi Sub-district and the prevalence of technical abstention typify the most common type of abstention in this area.

Keywords: Rational Choice, Non-Voting Behavior, Purwodadi Village

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	4
1. Perilaku Tidak Memilih di Masyarakat.....	4
2. Pemilihan Kepala Daerah.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis serta pendekatan penelitian	8
2. Sumber dan Jenis Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik analisis data.....	10
BAB II.....	12
KERANGKA TEORI.....	12
A. Rational Choice.....	12
1) Pengertian Rational Choice.....	12
2) Bentuk Rasionalitas.....	12
1. Rasionalitas Teknis	12
2. Rasionalitas Ekonomis	13
3. Rasionalitas Legal	13

4.	Rasionalitas Sosial.....	13
5.	Rasionalitas Substantif.....	13
B.	Non Voting Behavior	14
1)	Penjelasan Non-Voting Behavior.....	14
2)	Pendekatan Non-Voting Behavior.....	14
3)	Faktor Perilaku Tidak Memilih atau Non-Voting Behavior.....	15
a)	Faktor Demografis.....	15
b)	Faktor Sosial.....	16
c)	Faktor Psikologis.....	18
d)	Faktor Karakteristik Khusus Pemilu	19
4)	Jenis Golput atau Non-Voting Behavior	21
a)	Golput teknis	21
b)	Golput teknis-politis.....	21
c)	Golput politis.....	21
d)	Golput ideologis.....	22
BAB III.....		23
	LANDSCAPE DAN DINAMIKA PILKADA KELURAHAN PURWODADI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020	23
A.	Gambaran umum Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan	23
1.	Kondisi Geografi.....	23
2.	Kondisi Demografi.....	24
3.	Pejabat Pemerintahan Kelurahan Purwodadi	28
B.	Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020	29
C.	Profil Pasangan Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto	31
BAB IV		34
	ANALISIS PERILAKU RASIONAL PEMILIH GOLPUT PADA PILKADA KABUPATEN GROBOGAN DI KECAMATAN PURWODADI TAHUN 2020	34
A.	Perilaku Golput Didalam Masyarakat Kelurahan Purwodadi Pada Pilkada 2020.....	34
1.	Golput karena Pandemi Covid-19	35
2.	Kurang Sosialisasi pada Masa Pandemi	36
3.	Perilaku Golput karena Apatis	37
4.	Golput karena Pekerjaan	38
B.	Rasionalitas Pada Non-Voting Behavior di Kelurahan Purwodadi saat Pilkada 2020	41
1.	Karakteristik Pilihan Rasionalitas Teknis Pada Masyarakat Kelurahan Purwodadi	42

2.	Karakteristik Pilihan Rasionalitas Eknomis Pada Masyarakat Kelurahan Purwodadi	44
3.	Karakteristik Pilihan Rasionalitas Legal Pada Masyarakat Kelurahan Purwodadi .	46
C.	Perilaku Irasional didalam Pemilih Golput di Kelurahan Purwodadi	47
BAB V	50
	ANALISIS KLASIFIKASI SERTA FAKTOR PERILAKU TIDAK MEMILIH PADA MASYARAKAT KECAMATAN PURWODADI.....	50
A.	Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih di Kelurahan Purwodadi	50
1.	Faktor Demografi dalam Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih Masyarakat di Kelurahan Purwodadi.....	50
a)	Aspek usia dalam mempengaruhi perilaku tidak memilih	51
b)	Aspek pekerjaan dalam mempengaruhi perilaku tidak memilih	53
2.	Faktor Sosial dalam Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih Masyarakat di Kelurahan Purwodadi.....	55
a)	Lingkungan dalam mempengaruhi perilaku tidak memilih.....	55
b)	Solidaritas Kelompok mempengaruhi perilaku tidak memilih.....	58
3.	Faktor Psikologis dalam Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih Masyarakat di Kelurahan Purwodadi.....	59
Kepercayaan Serta Ketidakpuasan Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih		59
4.	Faktor Karakteristik Khusus Pemilu dalam Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih Masyarakat di Kelurahan Purwodadi	61
Preferensi Kebijakan Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih.....		62
B.	Ragam Perilaku Golput di Kelurahan Purwodadi	63
1.	Golput teknis yang terjadi di Kelurahan Purwodadi	64
2.	Golput politis yang terjadi di Kelurahan Purwodadi.....	68
3.	Golput ideologis yang terjadi di Kelurahan Purwodadi	70
BAB VI	73
	PENUTUP.....	73
A.	KESIMPULAN	73
B.	SARAN	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN.....	78
A.	Wawancara.....	78
B.	Dokumen	82
C.	Draft Wawancara.....	83
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Klasifikasi Usia Masyarakat Kelurahan Purwodadi.....	25
Tabel 3. 2 Status Pernikahan Masyarakat Kelurahan Purwodadi.....	26
Tabel 3. 3 Status Keagamaan Masyarakat Kelurahan Purwodadi.....	27
Tabel 3. 4 Pejabat Pemerintahan Kelurahan Purwodadi	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Wilayah Kelurahan Purwodadi.....	23
Gambar 3. 2 Kelurahan Purwodadi	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam pemilihan umum merupakan manifestasi yang sesungguhnya dari demokrasi sejati, karena ini mengembalikan sepenuhnya kedaulatan kepada rakyat, yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan demikian individu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan mereka. Sedangkan golongan putih (Golput) adalah orang-orang yang memilih untuk tidak menggunakan hak suara mereka. Perilaku tidak memilih atau golongan putih di Indonesia selalu muncul di setiap pesta demokrasi, perilaku tidak memilih atau golong putih muncul di era pemilu Orde Baru hingga saat ini perilaku tidak memilih masih ada dalam pemilihan di Indonesia. Pada pemilu terakhir tahun 2019 terdapat 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) setara dengan 18,02% atau sebanyak 192,77 juta DPT di Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri memiliki jumlah golput 5,52 juta jiwa atau 19,79% dari total pemilih di Jawa Tengah (Widi, 2022).

Kenyataan menunjukkan tingginya jumlah golput di Jawa Tengah juga terjadi pada Kabupaten Grobogan, dalam pilkada 2020 Kabupaten Grobogan memiliki tingkat partisipasi yang terendah daripada kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Banyak warga setempat memilih untuk tidak memilih dalam proses pencoblosan, fakta di lapangan ditemukan bahwa banyak pemilih yang memilih tidak hadir di TPS dengan tingkat partisipasi pemilih sekitar 63 persen dan sebanyak 36 persen memilih untuk tidak memilih (Jatengdaily, 2020). Kabupaten Grobogan memiliki 19 kecamatan yang memiliki 2.971 TPS pada pelaksanaan Pilkada 2020. Jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Grobogan yang terdata oleh KPU adalah 1.128.007 dimana tercatat DPT Laki-laki sebanyak 560.317 serta DPT Perempuan sejumlah 567.690, kemudian dari jumlah total pemilih yaitu 1,128,007 terdapat jumlah sebanyak 245.687 pemilih yang tidak memilih. Kenyataannya juga hal ini berimbas pada Kecamatan Purwodadi merupakan kecamatan yang memiliki pemilih paling banyak tidak memilih pada Pilkada 2020. Pada tingkat partisipasi paling rendah dari 19 Kecamatan di Kabupaten Grobogan, dimana terdapat 24 persen atau sebanyak 21.075 orang yang tidak memilih pada saat Pilkada 2020 (KPU, 2020).

Kecamatan Purwodadi merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, dan menjadi kota utama di Kabupaten Grobogan (Grobogan P. K., 2011). Di Kecamatan Purwodadi terdapat 17 Desa/Kelurahan yang dimana memiliki 412 jumlah TPS yang diselenggarakan,

serta memiliki jumlah DPT terbanyak yaitu 106.921 individu. Kecamatan Purwodadi merupakan kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Kabupaten Grobogan, dengan populasi pada tahun 2021 sekitar 1.488.947 jiwa (BPS, 2021). KPU mendata DPT dari pemilih laki-laki di Kecamatan Purwodadi sejumlah 52.512 orang serta perempuan sebanyak 54.409 orang. Dilain sisi dari rekapitulasi penggunaan total surat suara sendiri di wilayah Kecamatan Purwodadi sebanyak 106.921 surat suara namun terdapat 21.075 surat suara yang tidak memilih pada saat Pilkada 2020. Hasil dari rekapitulasi jumlah DPT laki-laki yang tidak memilih di Kecamatan Purwodadi sebanyak 12.371 orang dan perempuan 8.704 orang. (KPU, 2020). Hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa di TPS 11 di Kelurahan Purwodadi sendiri memiliki 74 orang yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dari 277 jumlah pemilih keseluruhan di TPS 11 sendiri (KPU, 2020).

Pada wilayah Kelurahan Purwodadi, tercatat sebanyak 17.688 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam pemilihan tersebut terdapat sekitar 3.212 individu yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan suara mereka. Terperinci, dari jumlah tersebut, 1.714 laki-laki memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, sementara 1.498 wanita juga memilih untuk tidak turut serta dalam proses pemilihan. Angka partisipasi pemilih yang rendah ini mencerminkan tantangan dalam memobilisasi sebagian warga masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Meskipun Kelurahan Purwodadi memiliki jumlah penduduk yang signifikan dalam DPT, jumlah pemilih yang tidak aktif tersebut memunculkan pertanyaan akan penyebab dari minimnya partisipasi dalam pemilihan (KPU, 2020).

KPU Grobogan melakukan strategi untuk mengurangi adanya tingkat partisipasi yang rendah pada masyarakat, dengan membuat Tim Relawan Demokrasi. Adanya penyelenggaraan sosialisasi bagi masyarakat agar mengawasi serta ikut menyukseskan pemilu 2020, masih belum berhasil dalam menanggulangi adanya sikap untuk tidak memilih dalam Pilkada 2020. Pada dasarnya hal ini menyangkut tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Edukasi Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Agus, 2020).

Penelitian yang telah dilakukan mengenai perilaku pemilih telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Dyah Ayu Lestari (2022) dan Ivani Octavia (2022). Penelitian pertama yang dilakukan Lestari (2022), pada Pilkada Gresik 2020 dilakukan kajian terhadap Golongan Putih di kalangan masyarakat bawah di Kecamatan Dukun. Perilaku memilih dan perilaku tidak memilih adalah yang pertama dari dua pengertian teoritis yang berkaitan dengan perilaku memilih. Sebaliknya, perilaku politik masyarakat Dukun Gresik banyak

menimbulkan golput yang dipengaruhi oleh alasan psikologis dan sosiologis sehingga memunculkan budaya golput (Lestari, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Octavia (2022) mengenai analisis perilaku pemilih masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Teori kategorisasi diri, sering disebut self-categorization theory atau juga dikenal sebagai social-identity theory. Menurut penelitian ini, Pilkada di Kabupaten Muaro Jambi lebih bersifat rasional dalam pengambilan keputusannya, terutama musyawarah dalam hal kualifikasi calon, pengalaman, dan tujuan yang telah ditetapkan (Octavia, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas Kecamatan Purwodadi merupakan kecamatan dengan jumlah pemilih yang tidak memilih tertinggi di Kabupaten Grobogan. Maka dengan ini signifikansi penelitian yang ingin diteliti adalah mengapa tingkat golput masyarakat Kecamatan Purwodadi tinggi dan faktor apa yang menjadi pengaruh pada perilaku tidak memilih di Kecamatan Purwodadi. Didasarkan dengan adanya latar belakang serta ketertarikan penulis dalam mengakat penelitian ini yang berjudul “Analisis Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting Behavior) Pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Purwodadi)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar dari latar belakang yang ada rumusan masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tingkat golput atau perilaku tidak memilih di Kelurahan Purwodadi tinggi?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tidak memilih di Kelurahan Purwodadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai penyebab tingginya tingkat golput di Kecamatan Purwodadi.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pengaruh pada pemilih yang tidak memilih di Kecamatan Purwodadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai menambah wawasan dan pengetahuan pembaca serta penulis mengenai kajian ilmu politik, serta dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa maupun masyarakat luas yang dimana terkhusus berkaitan dengan terjadinya penyebab perilaku tidak memilih di masyarakat Kecamatan Purwodadi.

2. Dari aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagaimana sebuah komunitas masyarakat dapat terjadi perilaku tidak memilih pada masa pemilu, serta menjadi perhatian bagi pemerintah terutama dalam mensosialisasikan pemilu yang menjadikan kesadaran bagi masyarakat agar tidak terjadi perilaku tidak memilih.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai golongan putih dalam pemilihan telah banyak dilakukan dari berbagai sumber-sumber yang telah melakukan penelitian. Hasil penulisan tinjauan penelitian ini akan dibagi menjadi dua tema, yakni mengenai perilaku tidak memilih masyarakat, dan pemilihan kepala daerah.

1. Perilaku Tidak Memilih di Masyarakat

Kajian perilaku tidak memilih telah banyak dilakukan oleh para ahli yaitu antara lain Harpinsyah dan Halim Perdana Kusuma (2021), kemudian Yogie Alhafizh (2017), Sesi Sutasih Simbala, Marlien T Lopian, dan Burhan Niode (2022), selanjutnya Lindo Karsyah, Asrinaldi, dan Aidinil Zetra (2019), dan yang terakhir oleh Herdi Fadillah (2015).

Kajian pustaka pertama mengenai perilaku golongan putih di masyarakat dilakukan oleh Harpinsyah dan Kusuma (2021). Didalam kajian ini dijelaskan dimana masyarakat di Kecamatan Pasar Muara Bungo termasuk kedalam kelompok golput awam. Berdasarkan dari penelitian ini juga rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di dalam pilkada Bungo terdapat tiga faktor yang menjadi pengaruhnya, yang pertama sosial ekonomi, kedua psikologis dan juga faktor rasional. Pada kajian ini faktor sosial ekonomi adalah faktor yang menjadi indikator terbesar dalam sebab terjadinya golput pada Pilkada Kabupaten Bungo di Kecamatan Pasar Muara Bungo (Harpinsyah & Kusuma, 2021).

Kajian berikutnya yang dilakukan oleh Yogie Alhafizh (2017), dimana pada penelitiannya mengenai perilaku dari adanya golongan putih di Fakultas Ushuluddin

pada Pemilu mahasiswa tahun 2016. Ditemukan teori perilaku pemilih yakni mengenai perilaku golput pragmatis, golput politis. Dikarenakan adanya apatis dan juga sikap pesimistis dari mahasiswa dalam pemilu mahasiswa tahun 2016. Serta dalam penelitian tersebut, terdapat pula mengenai faktor yang menjadi pendukung adanya perilaku golput tersebut dimana terdapat tiga faktor yaitu sosial, psikologis dan rasional (Alhafizh, 2017).

Kajian selanjutnya berbeda dengan kajian diatas namun berkaitan dengan perilaku golongan putih. Penelitian ini dilakukan oleh Karsyah, dkk (2019). Dijelaskan dimana dalam hal ini terdapat dua faktor yang didasarkan atas ketidakmemilihan masyarakat saat Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sijunjung. Pertama rendahnya moral dan kompetensi pasangan calon yang rendah. Penelitian ini menjelaskan adanya kompetensi dari pasangan calon merupakan ketidakmampuan menjadi pemimpin, tidak pandai dalam membuat ikon kabupaten, serta visi dan misi yang tidak realistis. Dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menjadikan faktor rasional pemilih merupakan alasan dalam melakukan golput yang terjadi di masyarakat. (Karsyah, Asrinaldi, & Zetra, 2019).

Kajian berikutnya ialah yang dilakukan oleh Simbala, dkk (2022). Penelitian ini berfokus pada faktor yang menyebabkan pemilih untuk tidak memilih, pada pemilihan umum Presiden serta anggota legislatif tahun 2019 Kecamatan Nuangan. Dimana terdapat teori yang menjadi alasan yang dilakukan pemilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, yang pertama adanya perilaku golput teknis, golput politis, dan yang terakhir golput ideologi. Dari penelitian ini pula diketahui terdapat tiga faktor yang mempengaruhi dari adanya golput yang terjadi di masyarakat. Adanya faktor sosial ekonomi, lalu terdapat faktor psikologis, dan faktor rasionalitas. Faktor ini tidak jauh berbeda dengan faktor yang telah banyak diteliti sebelumnya, hal tersebutlah yang menjadikan pemilih enggan berpartisipasi pada pemilihan legislatif 2019 (Simbala, Lopian, & Niode, 2022).

Lalu penelitian selanjutnya ditulis oleh Herdi Fadillah (2015), penelitian ini mengkaji tentang faktor yang berpengaruh dalam tingginya angka perilaku tidak memilih pada Pilgub di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013. Kajian ini menjelaskan terdapat bermacam faktor yang menjadi pengaruh tingkat terjadinya golput yang pertama adanya faktor golput dikarenakan alasan teknis, kemudian adanya faktor ekonomis, lalu terdapat faktor apatisme oleh masyarakat, faktor idealisme pemilih, adapun faktor dari kurangnya kesadaran

masyarakat, dan kemudian faktor masyarakat yang tidak berada di tempat (Fadillah, 2015).

2. Pemilihan Kepala Daerah

Adapun kajian mengenai pemilihan kepala daerah telah dilakukan oleh banyak peneliti diantaranya Ahmad Hasan Ubaid dan H.B. Habibi Subandi (2022), Sandra Mutiara Pratiwi, Hanny Purnamasari, dan Prilla Marsingga (2022), Nofia Mutmainah dan Wawan Sobari (2022), Lalu Agsal Fazalani, dan Joko J. Prihatmoko (2022), Rusli Razak (2020), dan juga Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejehave Al Jannah (2020).

Penelitian pertama mengenai pemilihan kepala daerah di Medan pada tahun 2020, yang dilakukan oleh Ubaid dan Subandi (2022), fokus pada perilaku pemilih dalam masyarakat multikultural. Dalam penelitian ini, teridentifikasi tiga faktor yang menjadi indikasi penting dalam pemilihan kepala daerah di Medan. Pertama, terdapat faktor sosiologis yang masih mendominasi pemilihan, dipengaruhi oleh agama, etnisitas, dan gender. Sementara itu, pemilih dengan pendekatan rasional dan psikologis menduduki peringkat kedua dan ketiga pada masyarakat politik. Selanjutnya, tingginya jumlah pemilih yang memilih berdasarkan agama merupakan alasan mengapa para calon cenderung menghindari membawa topik tersebut ke perdebatan kampanye mereka. (Ubaid & Subandi, 2022).

Jurnal riset berikutnya yang telah disusun oleh Pratiwi, dkk (2022), memusatkan perhatian pada Pilkada di Karawang tahun 2020. Penelitian ini mengulas perilaku pemilih, yang merujuk pada tindakan pemilih dalam menentukan pilihan politik yang dianggapnya paling sesuai atau disukai. Dalam proses pengambilan keputusan ini, dipengaruhi dua pendekatan dari teori Afan Gaffar, yakni Mazhab Columbia (sosiologis) dan Mazhab Michigan (psikologis). Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan bahwa perilaku pemilih di Kabupaten Karawang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk sosiologis, psikologis, dan faktor rasionalitas. Ketiga faktor itu dianggap paling dominan di antara semua faktor yang telah ada sebelumnya (Pratiwi, Purnamasari, & Marsingga, 2022).

Adapun kajian mengenai Pilkada yang dilakukan oleh Razak (2020), dimana adanya analisis voting behavior pada pelaksanaan pilkada di Sulawesi Selatan. Dimana dijelaskan adanya faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih, yang pertama sosiologis, psikologis dan rasional atau dikerucutkan menjadi dua yaitu faktor rasional-kalkulatif dan emosional-tradisional. Dari adanya penelitian ini faktor yang paling

menentukan dari adanya perilaku pemilih di pilkada Sulawesi Selatan adalah adanya faktor rasional yang dimiliki oleh kebanyakan pemilih dan hanya sedikit yang memilih secara tradisional. Dengan demikian penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu yang memiliki faktor-faktor yang sama dalam mempengaruhi dari adanya perilaku pemilih di dalam sebuah pemilihan (Razak, 2020).

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Mutmainah dan Sobari (2022) dimana penelitian ini berfokus pada meningkatnya perilaku tidak memilih (non voting behavior) pada Pilkada di Kabupaten Malang pada tahun 2020. Diketahui bahwa pemilih yang terdaftar pada TPS tersebut adalah istri dari prajurit TNI atau Persit (Persatuan istri tentara). Perilaku memilih persit dapat dijelaskan melalui empat pendekatan dalam konsep perilaku tidak memilih dari Regsadle dan Rusk (1993), pendekatan demografis, pendekatan psikologis, pendekatan struktural dan pendekatan rasional. Selain itu status suami sebagai TNI, keadaan lingkungan sekitar, tidak maksimalnya peran petugas penyelenggara pemilu, dan asal daerah pemilih turut serta merta memberikan pengaruh akan perilaku tidak memilih persit. (Mutmainah & Sobari, 2022)

Penelitian mengenai Pilkada 2020 yang dilakukan oleh Fazalani, dan Prihatmoko (2022) berfokus pada voting behavior pemula dalam Pilkada di Kota Semarang tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan mengenai tipe-tipe perilaku pemilih pemula, yang pertama adanya pemilih rasional, kritis, tradisional, dan juga skeptis. Adapun penelitian ini mengkaji mengenai faktor yang mempengaruhi dari para pemilih pemula, yaitu adanya faktor sosiologis, psikologis, dan rational choice atau pilihan rasional yang menjadi titik dari kajian penelitian ini. Dengan demikian adanya penelitian ini dapat menjelaskan perilaku pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih sesuai dengan mereka bersosialisasi di dalam masyarakat yang menyebabkan pengaruh terhadap diri pemilih pemula dalam menentukan pilihannya. (Fazalani & Prihatmoko, 2022)

Berbeda dengan temuan dari studi penelitian lainnya, penelitian yang disusun oleh Samsul, dkk (2022) memiliki fokus pada Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia di tengah peningkatan kasus Covid-19. Penelitian ini mendalam tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada tersebut. Dalam kajian ini, terdapat dua faktor utama yang menjadi pusat perhatian, yaitu pengaruh politik lokal dan kondisi ekonomi. Ketika meninjau hasil Pilkada yang mencatat peningkatan partisipasi pemilih, pemerintah serta penyelenggara menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini dapat dianggap berhasil, walaupun dilakukan di tengah Covid-19 (Ode, Dalupe, Regif, & Jannah, 2022).

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa dari analisis tinjauan pustaka mengenai perilaku tidak memilih serta pilkada dimana masih terdapat banyaknya perilaku yang tergolong pada karakteristik pemilih non-voting dan rendahnya tingkat partisipasi politik di masyarakat walaupun indeks di dalam partisipasi masyarakat merujuk kedalam hal yang membaik dari setiap tahunnya. Dari hasil yang dilihat dalam kajian pustaka ini adanya partisipasi dan politik yang baik tidak diimbangi dengan demokrasi yang baik, cenderung negara Indonesia mengalami penurunan dalam hal demokrasi dunia. Masih banyaknya tingkat partisipasi yang dilakukan masyarakat namun diiringi dengan tingkat money politik dan terdapat politik identitas yang telah dilakukan kandidat calon maupun dari lingkungan masyarakat sendiri yang menjadikan perilaku yang menyimpang dalam pemilihan itu sendiri.

Dalam penelitian ini berfokus pada analisis perilaku tidak memilih yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada Pilkada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dalam tujuan bagaimana perilaku masyarakat Kecamatan Purwodadi memilih dalam Pilkada 2020. Penelitian ini pun akan ditambah dengan bagaimana dampak dari adanya perilaku tidak memilih pada Pilkada tahun 2020 terhadap legitimasi masyarakat dengan adanya Pemilu mendatang. Dengan adanya penelitian ini, menjadi penelitian yang memperkuat penelitian terdahulu serta terdapat perbedaan dari penelitian yang ingin peneliti tulis mengenai dampak dari adanya perilaku non-voting behavior tahun 2020 pada legitimasi di masyarakat tentang pelaksanaan Pemilu untuk masa depan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis serta pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan dengan pendekatan penelitian adalah dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*), pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (*behavior*) dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. Karena apa yang kelihatan menggejala tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan

obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Atas dasar itu penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti, mendalami dan menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejala-gejala yang sangat dalam. Kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya. Sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tersebut yang sifatnya subjektivitas (Harahap, 2020).

Pada penelitian ini studi kasus sangat relevan dengan pendekatan kualitatif, hal ini dapat dilihat dari banyaknya referensi diberbagai sumber data primer maupun skunder yang terdapat pada artikel maupun informasi dari instansi terkait. Studi kasus ini membuat kesimpulan dari adanya gejala-gejala didalam partisipasi politik masyarakat Kecamatan Purwodadi dalam Pilkada Grobogan tahun 2020.

2. Sumber dan Jenis Data

Data primer serta data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang nantinya diperoleh secara langsung dari individu atau perorangan dengan wawancara. Oleh karena itu, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diberikan kepada pemilih di Kecamatan Purwodadi yang memenuhi syarat maupun kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Sumber sekunder merupakan sumber kedua, pada penelitian ini bisa berupa data yang tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, maupun dokumen resmi maupun pribadi (Moleong, 2018). Penyelidikan informasi diperoleh melalui media perantara atau secara implisit dalam kerangka bukti-bukti atau berkas-berkas yang ada, baik yang disebarluaskan maupun tidak dipublikasikan secara umum, juga buku catatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam setiap penelitian. Hal ini menjadi sangat penting karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data pendukung yang diperlukan. Menurut Sugiyono (2017), cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi terlibat, wawancara mendalam, studi dokumen dan triangulasi. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan tatap muka dimana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicara. Dimana hal ini menjadikan sebuah komunikasi verbal dengan tujuan bertanya kepada salah satu pihak dengan mengajukan beberapa

pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan informasi yang nantinya jawaban tersebut berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa sumber yakni, masyarakat, tokoh masyarakat, terkait dengan subjek penelitian yang dikaji.

b) Studi Dokumen dan Literatur

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung penelitian seperti data KPU, data wawancara, gambar, foto, peta, data statistik, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai pembantu penulis dalam melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dalam penelitian yang nantinya akan dituangkan pula sebagai analisis pendukung terhadap objek kajian penelitian. Teknik selanjutnya adalah dengan menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan beberapa data yang berasal dari sejumlah buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkenaan dengan topik penelitian. Studi literatur dilakukan dengan tujuan menganalisis berbagai teori terkait dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan sebagai rujukan dalam pembuatan analisis hasil penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi Menurut Sugiyono (2017) berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Rekaman dapat berupa komposisi, gambar, atau karya penting dari seseorang. Laporan dalam bentuk karangan, misalnya kasus, arahan pendekatan, biografi tokoh, arsip dalam bentuk gambar atau foto, dan sebagainya (Sugiyono, 2017).

4. Teknik analisis data

Analisa melibatkan pengelompokan, penyusunan dalam urutan tertentu, manipulasi, dan penggabungan data agar lebih mudah dipahami. Langkah awal dalam proses analisis adalah menggolongkan data ke dalam kelompok atau kategori yang sesuai. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang lebih terfokus dan terstruktur, sehingga data menjadi lebih teratur dan memiliki makna yang lebih signifikan.

Melakukan editing pada data yang telah dilakukan melalui wawancara kemudian, data tersebut akan menjadi lebih signifikan ketika diinterpretasikan dan dianalisis secara lebih mendalam. Menganalisis data yang telah ditemukan di lapangan adalah tahapan penting dalam proses penelitian. Teknik analisis data ini melibatkan langkah-langkah seperti pengorganisasian, pengelompokan, dan menghubungkan data dengan teori yang

dipakai, dengan adanya tujuan untuk mencari jawaban pada hasil analisis tersebut (Nazir, 1988).

Selanjutnya dilakukan Proses klasifikasi data melibatkan analisis mendalam dan pengelompokan data yang telah dipahami oleh peneliti. Klasifikasi data ini mengorganisasi informasi sesuai dengan sub bab yang relevan. Klasifikasi data terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan kategorisasi pertanyaan yang digunakan. Peneliti mengumpulkan data dari wawancara dengan para informan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah berdasarkan nomor pertanyaan yang sesuai.

Setelah mereduksi dan pengelompokan data, langkah selanjutnya adalah tabulasi data, yang merupakan sebuah proses menata data di dalam bentuk tabel yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Tahap terakhir adalah verifikasi data, yang melibatkan pada adanya pemeriksaan ulang dari adanya data yang sudah terkumpul dalam memastikan keabsahannya. Dalam tahap verifikasi ini, peneliti kemudian melakukan pengecekan juga membandingkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada para sampel responden yang telah dibuat oleh peneliti (Nazir, 1988).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Rational Choice

1) Pengertian Rational Choice

Teori pilihan rasional dikenal sebagai teori tindakan rasional atau teori pilihan, adalah suatu aliran pemikiran yang berasumsi bahwa individu akan memilih tindakan yang paling sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Teori ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana manusia membuat keputusan, terutama dalam konteks ekonomi mikro. Ini membantu ekonom untuk mendalami perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan individu yang, sebagaimana dijelaskan oleh rasionalitas, konsisten dengan preferensi pribadi mereka. Selain dalam ekonomi, teori pilihan rasional juga semakin diterapkan dalam berbagai bidang lainnya seperti teori evolusi, ilmu politik, dan bidang perang (Amadae, 2016)

Menurut Coleman, Teori pilihan rasional adalah ketika individu atau aktor bertindak secara rasional dengan melakukan tindakan yang didasarkan pada tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau preferensi. Pendekatan utama dalam pemikiran rasional menurut Coleman adalah bahwa "orang-orang bertindak secara sengaja menuju suatu tujuan, dengan tujuan tersebut dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi" (Coleman, 2011).

Adapula penjelasan irasional yang merupakan kebalikan dari sikap rasional didalam individu, menurut Ellis dalam Rickye L. George dan Therese Stridde Cristiani yang ditulis oleh Paulus Erwin Sasmita (2015), Pikiran irasional ini tidak muncul secara logis, melainkan terbentuk dari pengalaman-pengalaman serta pembelajaran yang tidak masuk akal, yang secara kolektif diperoleh dari lingkungan sosial seperti orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga budaya. (Sasmita, 2015).

2) Bentuk Rasionalitas

Karakteristik utama dari berbagai bentuk rasionalitas adalah bahwa semuanya melakukan pemilihan secara bernalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Adapun bentuk-bentuk rasionalitas menurut Paul Diesing, adalah sebagai berikut:

1. Rasionalitas Teknis

Rasionalitas teknis adalah sifat dari keputusan yang dipertimbangkan secara logis, dimana berbagai pilihan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan efisien. Hal ini melibatkan perbandingan antara alternatif-alternatif yang ada, dengan mempertimbangkan seberapa baik masing-masing dapat mengatasi suatu masalah secara efektif.

2. Rasionalitas Ekonomis

Rasionalitas ekonomis adalah ciri khas dalam membuat keputusan yang masuk akal dengan membandingkan berbagai opsi berdasarkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang paling efisien. Ini mengacu pada kemampuan individu atau entitas untuk secara logis mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang optimal dalam memecahkan suatu masalah atau situasi tertentu.

3. Rasionalitas Legal

Rasionalitas legal mencakup proses pemilihan yang berdasarkan penalaran, mempertimbangkan alternatif-alternatif berdasarkan kesesuaian mereka dengan peraturan hukum yang berlaku serta dengan pertimbangan kasus-kasus penyelesaian sebelumnya. Hal ini menandakan adanya suatu karakteristik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan hukum, di mana penalaran dan evaluasi atas opsi-opsi yang ada didasarkan pada kerangka hukum yang telah ada serta pengalaman dari penyelesaian kasus serupa di masa lalu.

4. Rasionalitas Sosial

Rasionalitas sosial mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk membuat keputusan yang didasarkan pada pemikiran yang masuk akal terkait dengan membandingkan berbagai alternatif. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana pilihan yang diambil dapat memelihara atau bahkan meningkatkan nilai dari berbagai institusi sosial yang ada. Dalam konteks ini, rasionalitas sosial menjadi suatu karakteristik yang mendasari proses pengambilan keputusan yang memiliki dampak terhadap kelangsungan dan peningkatan kualitas dari struktur sosial yang ada.

5. Rasionalitas Substantif

Rasionalitas substantif mencakup sifat pilihan yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal dalam mempertimbangkan beragam jenis rasionalitas seperti teknis, ekonomis, legal, dan sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan yang terbaik dalam

situasi yang sedang dihadapi. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, tujuannya adalah untuk membuat pilihan yang paling sesuai dan tepat mengingat konteks dan kondisi yang ada (Diesing, 1962).

B. Non Voting Behavior

1) Penjelasan Non-Voting Behavior

Susan Welch menjelaskan ketidakhadiran dalam pemilihan umum terkait pada tingkat kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Jika pemilih merasa puas dengan tidak berpartisipasi dalam pemilihan, maka mereka cenderung tidak akan mengikuti pemilu. Sebaliknya, jika seseorang merasa tidak puas, mereka mungkin akan memilih untuk hadir dalam pemilihan. Selain itu, ketidakhadiran juga terkait dengan pertimbangan mengenai keuntungan dan kerugian. Jika seseorang merasa bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan finansial lebih besar dengan tidak mengikuti pemilu, maka mereka mungkin akan memilih untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dapat menguntungkan (Efriza, 2012).

Muhammad Asfar menjelaskan bahwa konsep non-voting behavior tidak diterapkan pada pemilih yang tidak dapat memakai hak pilihnya karena adanya kelalaian atau situasi yang di luar kendali mereka. Contohnya, ketika seseorang tidak dapat memilih karena sakit atau kondisi cuaca yang sangat buruk, atau karena berada di pelosok atau di dalam hutan yang membuatnya sulit memilih. Dalam situasi seperti ini, non-voting tidak mencerminkan sebuah sikap politik yang disengaja, tetapi lebih disebabkan oleh keadaan di luar kendali pemilih yang membuat mereka tidak dapat memilih pada hari pemilihan (Efriza, 2012).

2) Pendekatan Non-Voting Behavior

Pada buku Efriza penjelasan teoritis mengenai non-voting behavior pada intinya tidak jauh berbeda dengan adanya pendekatan yang digunakan dalam menganalisis perilaku pemilih. Menurut Moon, ia merinci bahwa umumnya memiliki dua pendekatan dalam penerapannya yang menjadikan mengapa pemilih hadir atau tidak hadir dalam sebuah pemilihan, dengan merujuk pada karya-karya Ashenfelter dan Kelley (1975), Burnham (1987), Powell (1986), dan Downs (1957). Pendekatan pertama fokus pada faktor-faktor seperti karakter sosial dan psikologis pemilih, serta mengenai karakteristik dari sistem pemilihan itu sendiri. Sedangkan, pendekatan kedua mementingkan pada harapan pemilih mengenai manfaat dan

kerugian yang pemilih alami dari keputusan untuk ikut hadir atau tidak dalam acara pemilihan. Namun, pendekatan tersebut memiliki tantangan dan kontroversi tersendiri. (Efriza, 2012)

3) Faktor Perilaku Tidak Memilih atau Non-Voting Behavior

Dalam jurnal yang ditulis oleh Restiani Fauzie (2013) terdapat faktor yang menjadi penyebab perilaku tidak memilih atau non-voting behavior, dimana terdapat empat aspek dalam faktor tersebut, yaitu:

a) Faktor Demografis

- 1) Pendidikan, Warga yang telah menempuh pendidikan formal cenderung lebih memilih dalam proses pemilihan umum. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan motivasi bagi individu untuk berpartisipasi dalam pemilihan dengan menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, pendidikan juga dapat menarik mereka ke dalam ranah politik atau menempatkan mereka dalam struktur sosial yang mendorong partisipasi aktif. Pendidikan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam proses pemungutan suara, karena individu yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pemilihan.
- 2) Pekerjaan, memiliki pekerjaan dalam jabatan yang dihormati atau memiliki status yang tinggi secara signifikan meningkatkan kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam pemilihan. Otoritas dalam pekerjaan diharapkan dapat menciptakan rasa hak sosial yang lebih besar, yang sering kali tercermin dalam partisipasi politik. Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat partisipasi antara manajer dan administrator dengan para profesional dari latar belakang ekonomi yang serupa. Meskipun demikian, bukti lain menunjukkan bahwa pegawai pemerintah memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Ini mungkin karena pegawai pemerintah memiliki kepentingan yang jelas dalam hasil pemilihan, seperti menjaga pekerjaan mereka dan sifat pekerjaan yang dapat dipengaruhi oleh siapa yang menduduki jabatan publik tertentu.
- 3) Usia, perubahan dalam partisipasi pemilihan tampaknya berkaitan erat dengan usia seseorang. Seiring dengan perjalanan dari awal masa dewasa hingga mencapai dewasa pertengahan, terdapat peningkatan

kecenderungan untuk terlibat dalam proses pemilihan. Namun, setelah mencapai usia sekitar 75 tahun, kecenderungan untuk terlibat dalam pemilihan tampaknya menurun secara signifikan.

- 4) Gender, perubahan signifikan juga terjadi dalam peran gender terhadap tingkat partisipasi pemilih. Sebelum tahun 1980-an, perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Mereka merasa kurang efektif dan kurang tertarik pada politik, dengan tingkat tanggung jawab yang lebih rendah di tempat kerja. Namun, mulai pertengahan 1980-an, perempuan mulai memberikan suara dalam jumlah yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perubahan ini tampaknya dipicu oleh peningkatan efikasi politik dan minat politik yang meningkat pada perempuan pada periode waktu tersebut.
- 5) Tempat tinggal, faktor tempat tinggal memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlibatan dalam proses pemilihan. Individu yang bermukim di daerah pedesaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk ikut serta dalam proses pemungutan suara daripada mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Perbedaan ini menandai peran lingkungan tempat tinggal dalam memengaruhi aktifitas politik setiap individu (Fauzie, 2013).

b) Faktor Sosial

- 1) Karakteristi Lingkungan, pentingnya lingkungan sosial ekonomi terbukti sebagai faktor penting dalam keaktifan politik seseorang. Keterkaitan antara tingkat pendidikan, status sosial, dan lingkungan tempat seseorang tinggal memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlibatan politik. Individu yang memiliki pendidikan rendah namun tinggal di lingkungan dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung lebih aktif secara politik daripada individu berpendidikan rendah yang tinggal di lingkungan serupa. Penelitian juga menunjukkan bahwa faktor lain, seperti afiliasi partai politik yang merata di lingkungan, turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, tingkat homogenitas rasial di suatu daerah juga memengaruhi tingkat partisipasi politik, di mana tinggal di daerah yang rasialnya homogen cenderung menghasilkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi daripada daerah yang lebih heterogen secara rasial.

- 2) Pernikahan, dalam kaitannya dengan partisipasi politik pernikahan dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi tingkat keterlibatan pemilih. Menurut penelitian oleh Kingston & Finkel (1987) dan Stoker & Jennings (1995), pemilih yang sudah menikah cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang masih single. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemilih yang sudah menikah cenderung meningkatkan partisipasinya lebih cepat daripada mereka yang belum menikah (Stoker & Jennings, 1995). Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya dorongan politik yang datang dari salah satu pasangan yang dapat menginspirasi pasangan lainnya yang mungkin kurang termotivasi untuk terlibat dalam proses pemilihan, entah melalui upaya persuasi yang terstruktur atau hanya dengan eksposur terhadap informasi politik.
- 3) Partisipasi dalam Organisasi, Keterlibatan dalam kegiatan sukarela di berbagai organisasi sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlibatan politik individu. Melalui interaksi dan kolaborasi dalam kerja sama dengan orang lain, seseorang cenderung menumbuhkan minat yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Dengan demikian, tingkat partisipasi dalam organisasi masyarakat memiliki korelasi positif dengan keterlibatan politik seseorang.
- 4) Solidaritas Kelompok, ketika anggota dari suatu kelompok sosial merasa kuat terikat dengan identitas kelompok mereka, mungkin berdasarkan ras, status ekonomi, jenis kelamin, atau usia. Hal ini sering kali memunculkan kesadaran kelompok yang dapat menginspirasi peningkatan partisipasi dalam pemilihan. Individu yang memiliki kedekatan emosional atau keterikatan yang kuat terhadap kelompoknya seringkali memiliki motivasi yang lebih besar untuk terlibat dalam pemilihan karena mereka peduli terhadap isu-isu yang memengaruhi kelompok mereka secara keseluruhan. Selain itu, keterikatan yang kuat ini juga bisa memberikan mereka keterampilan atau pengetahuan yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk terlibat lebih aktif dalam proses pemilihan.
- 5) Kewajiban Warga Negara, kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki korelasi yang signifikan dengan partisipasi politik, terutama dalam pemilihan umum. Individu yang menyadari kewajiban moral mereka sebagai anggota masyarakat cenderung aktif dalam politik,

termasuk dengan memberikan suara dalam pemilihan. Mereka meyakini bahwa hal ini merupakan tanggung jawab moral yang melekat pada status mereka sebagai warga negara. Individu yang meyakini bahwa semua warga negara mempunyai tanggung jawab untuk turut serta dalam proses pemilihan umum lebih mungkin terlibat dalam proses pemilihan dibandingkan dengan mereka yang tidak menganggap hal ini sebagai kewajiban fundamental (Fauzie, 2013).

c) Faktor Psikologis

- 1) Kepercayaan terhadap politik, individu yang memiliki kepercayaan yang tinggi pada orang lain cenderung lebih mungkin untuk terlibat dalam proses pemilihan. Kemungkinan individu yang kehilangan kepercayaan dalam sistem politik adalah mereka yang merasa bahwa sistem tersebut korup, yang bisa mengurangi motivasi mereka untuk terlibat aktif. Kekurangan kepercayaan terhadap sistem politik mungkin menyebabkan penurunan partisipasi seseorang dalam aktivitas politik. Jika individu merasa skeptis terhadap sistem politik, mereka mungkin kurang cenderung untuk berpartisipasi dalam upaya politik.
- 2) Efikasi Politik, tingkat efektivitas politik seseorang sangat berpengaruh pada partisipasi dalam pemilihan, ini berkaitan dengan dua bentuk efikasi politik, yaitu internal, yaitu keyakinan pada kemampuan diri dalam memahami dan terlibat dalam politik, dan eksternal, yakni kepercayaan pada tanggapan institusi politik terhadap kebutuhan warga. Salah satu kontribusi terpenting dari perspektif psikologis adalah gagasan teori efikasi politik, yang pertama kali dikenali sebagai pengaruh pada perilaku pemilih oleh Campbell, Gurin, dan Miller (dalam Hadjar & Beck, 2010). Dalam pendekatan pilihan rasional, efikasi politik juga dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih, teori ini menyatakan bahwa individu cenderung memberikan suara jika mereka yakin bahwa suara mereka memiliki dampak.
- 3) Ketertarikan pada politik memainkan peran kunci dalam partisipasi politik seseorang. Keterlibatan dalam diskusi politik dengan keluarga dan teman

serta mengikuti perkembangan politik merupakan hasil dari ketertarikan individu terhadap ranah politik.

- 4) Kepuasan terhadap institusi politik dan para pelaku politik dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Ketidakpuasan terhadap sistem politik dan kebijakan pemerintah cenderung mengurangi motivasi untuk terlibat dalam proses politik. Orang yang puas dengan pemerintahan cenderung lebih mungkin untuk menggunakan hak pilihnya.
 - 5) Perilaku pemilihan merupakan suatu kebiasaan. Mengambil bagian dalam pemilihan secara berkala dapat meningkatkan kemungkinan partisipasi dalam pemilu berikutnya. Pengalaman pertama dalam memberikan suara dapat memengaruhi keputusan untuk melakukan hal yang sama di masa mendatang.
 - 6) Kesabaran memegang peran penting dalam partisipasi pemilihan. Persiapan sebelum hari pemilihan dan manfaat yang dirasakan setelahnya merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Individu yang lebih sabar cenderung lebih aktif dalam proses pemilihan.
 - 7) Altruisme juga memiliki dampak dalam keputusan untuk memilih. Orang-orang yang peduli terhadap kesejahteraan orang lain lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam pemilihan dibandingkan dengan mereka yang berpikiran egois.
 - 8) Kepuasan hidup individu juga mempengaruhi partisipasi dalam pemilu. Studi menunjukkan bahwa orang yang merasa puas dengan kehidupan mereka memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi dalam proses politik (Fauzie, 2013).
- d) Faktor Karakteristik Khusus Pemilu
- 1) Kekuatan Calon Pilihan, Kesenjangan antara preferensi seseorang terhadap calon dan sikapnya terhadap pesaingnya memiliki pengaruh pada keputusan pemilihan. Semakin besar kesenjangan ini, semakin besar kemungkinan seseorang memilih salah satu calon.
 - 2) Preferensi Kebijakan, kemiripan preferensi kebijakan antara calon bersaing berpengaruh pada keputusan pemilih. Ketika calon memiliki kesamaan dalam preferensi kebijakan, kecenderungan warga untuk memilihnya meningkat karena perbedaan hasil yang tidak signifikan dalam manfaat yang diperoleh ataupun sebaliknya ketika preferensi kebijakan

cenderung berbeda masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai penolakannya.

- 3) Iklan Negatif, teori kompetisi politik menyarankan adanya efek berlawanan dari iklan negatif terhadap pemilih. Meskipun iklan negatif dapat mengkritik satu calon, terkadang hal ini juga dapat memuji lawannya. Hal ini dapat memicu sinisme dan apatis terhadap kandidat di kalangan warga.
- 4) Pengaruh Kampanye, partisipasi pemilih dalam pemilihan dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi selama kampanye politik. Kehadiran calon yang konvensional dan populer, seperti kasus Ross Perot dalam pemilihan presiden 1992, dapat memberikan inspirasi kepada warga untuk memberikan suara mereka.
- 5) Pemilihan yang Diwajibkan, pemilihan yang diwajibkan meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di negara-negara yang menerapkan aturan pemungutan suara wajib seperti Belgia dan Swiss. Meskipun demikian, di negara-negara di mana pemungutan suara wajib secara hukum tetapi tidak ditegakkan melalui sanksi (seperti Luksemburg, Yunani, Italia), tingkat partisipasi juga bisa tinggi karena kesadaran warga terhadap kewajiban memilih.
- 6) Faktor Disproporsionalitas, negara-negara dengan tingkat disproporsionalitas tinggi cenderung memiliki tingkat ketidakpartisan yang lebih tinggi. Temuan terbaru menunjukkan bahwa tidak hanya kemungkinan memberikan suara yang terpengaruh, tapi juga kesuksesan politik, dipengaruhi oleh disproporsionalitas dalam sistem pemilihan negara tersebut.
- 7) Kedewasaan Demokrasi, ketidakpartisan lebih mungkin terjadi di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang belum lama terbentuk. Hal ini terkait dengan rendahnya efikasi politik, terutama di negara-negara di mana proses pembelajaran politik masih berkembang. Oleh karena itu, non-partisipasi dalam pemilihan mungkin lebih umum di negara-negara dengan pengalaman demokrasi yang pendek (Fauzie, 2013).

4) Jenis Golput atau Non-Voting Behavior

Menurut Eep Saefulloh Fatah dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Bismar Arianto (2011) mengenai penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu, dirinya mengklasifikasikan golput atas empat golongan, yaitu:

a) Golput teknis

Merujuk pada individu yang mengalami kendala dalam berpartisipasi dalam proses pemungutan suara dikarenakan alasan-alasan teknis tertentu. Beberapa di antara mereka mungkin tidak dapat hadir di lokasi pemungutan suara karena situasi mendadak seperti kematian anggota keluarga, kelelahan yang berlebihan sehingga tertidur, atau alasan lain yang bersifat keadaan darurat. Selain itu, terdapat pula kelompok yang melakukan kesalahan saat mencoblos sehingga suara yang mereka berikan dianggap tidak sah oleh penyelenggara pemilu.

b) Golput teknis-politis

Menggambarkan situasi di mana sejumlah individu tidak terdaftar sebagai pemilih karena sejumlah alasan, baik disebabkan oleh kesalahan pribadi maupun kesalahan dari pihak terkait seperti lembaga statistik atau penyelenggara pemilu. Kategori ini mencakup kondisi di mana ada kesalahan dalam pencatatan data pemilih, ketidaksesuaian informasi yang diperlukan untuk registrasi pemilih, atau ketidaktepatan dalam proses administratif yang berujung pada ketidak terdaftaran sebagai pemilih dalam daftar resmi pemilihan.

c) Golput politis

Mereka yang termasuk dalam golongan golput politis cenderung memiliki pandangan skeptis terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari partisipasi dalam pemilihan umum. Mereka bisa merasa bahwa pemilu tidak secara substansial akan membawa perubahan atau meremehkan kapasitas calon untuk memenuhi harapan publik atau memperbaiki kondisi yang ada. Beberapa dari mereka mungkin juga merasa bahwa kandidat yang tersedia tidak sepenuhnya mencerminkan nilai atau prinsip yang mereka yakini, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak menggunakan hak suaranya.

d) Golput ideologis

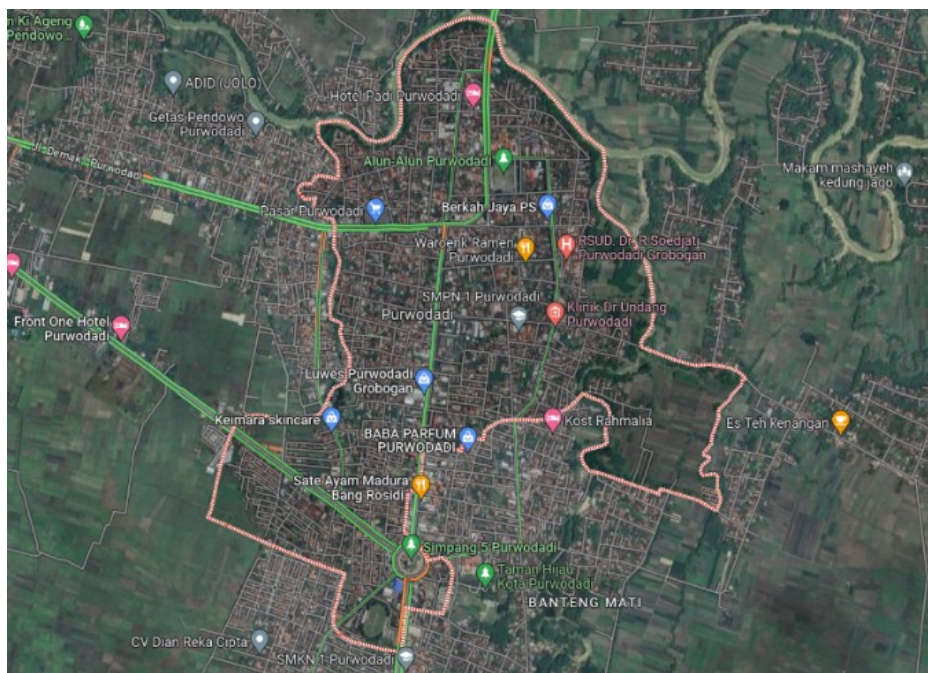
Melibatkan individu yang menolak berpartisipasi dalam pemilihan umum karena pandangan ideologis yang diyakininya. Mereka ini secara khusus menolak melibatkan diri dalam mekanisme demokrasi yang bersifat liberal dan menitikberatkan keputusan mereka pada dasar keyakinan politik atau ideologis yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konvensional. Hal ini bisa berakar pada keengganan mereka untuk terlibat dalam proses demokratisasi karena alasan ideologis, seperti pandangan yang mendasari aspek-aspek fundamental agama atau alasan-alasan ideologis yang lainnya (Arianto, 2011).

BAB III

LANDSCAPE DAN DINAMIKA PILKADA KELURAHAN PURWODADI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan akan gambaran dan dinamika pilkada secara umum yang ada pada lokasi penelitian di Kelurahan Purwodadi Kabupaten Purwodadi. Selain itu akan terbagi menjadi bagian-bagian mengenai gambaran umum Kelurahan Purwodadi yang terbagi berdasar kondisi geografi, kondisi demografi, serta pejabat pemerintahan yang menjabat di Kelurahan Purwodadi. Kemudian mengenai pelaksanaan dari adanya pilkada di Kabupaten Grobogan Tahun 2020, dan juga mengenai profil pasangan calon pada saat terjadinya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2020.

A. Gambaran umum Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan



Gambar 3. 1 Wilayah Kelurahan Purwodadi

1. Kondisi Geografi

Kelurahan Purwodadi merupakan salah satu kelurahan atau desa yang terdapat pada Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Purwodadi secara topografi berbentuk lembah yang terletak diantara dua pegunungan kapur, yakni Pegunungan Kendeng atau Pegunungan Kapur Selatan pada bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara, serta dibatasi oleh Sungai Lusi dibagian Timur dan Utara wilayah Kelurahan Purwodadi. Dua rangkaian gunung tersebut terdiri

dari berbagai jenis hutan, seperti jati, mahoni, dan hutan campuran. Hutan-hutan ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai tempat penyerapan air hujan dan juga sebagai area pertanian, walaupun kondisi tanahnya tidak begitu subur. Di sepanjang lembah yang membentang dari barat ke timur, terdapat lahan pertanian yang sangat produktif, dan sebagian besar telah mendapatkan dukungan dari sistem irigasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Program Kehutanan tentang iklim di Kabupaten Grobogan yang terletak di antara Daerah Pantai Utara bagian timur dan daerah Bengawan Solo Hulu mempunyai tipe iklim D yang bersifat 1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 6 bulan basah dengan suhu minimum 26^oC. Rata-rata hari hujan per bulan Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 adalah 8 hari, sedangkan rata-rata curah hujan per bulan tercatat 141 mm. Hal tersebut menjadi acuan bagi daerah-daerah lainnya di Kabupaten Grobogan termasuk Kelurahan Purwodadi sendiri yang memiliki iklim demikian (Grobogan B. P., 2023).

Dari segi topografi wilayah Kelurahan Purwodadi merupakan daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter diatas permukaan laut dengan kelerengn 00-80. Berdasarkan dengan geografi yang terdapat pada Kabupaten Grobogan, Kelurahan Purwodadi tidak berbeda jauh memiliki tiang penyangga utama pada perekonomiannya berada pada sektor pertanian serta merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air bersih (Grobogan B. P., 2023). Jarak dari Purwodadi ke beberapa kota sekitarnya antara lain: Semarang +-64 Km, Demak +-39 Km, Kudus +- 45 Km, Pati +-45 Km, Blora +-64 Km, Sragen +-64Km dan Surakarta +-64 Km. Batas-batas dari wilayah Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Getasrejo, Kecamatan Grobogan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Karanganyar dan Desa Kalongan

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Danyang

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Kuripan.

2. Kondisi Demografi

Kelurahan Purwodadi merupakan sebuah wilayah yang terbagi menjadi lima Dusun yang berbeda. Dari kelima Dusun tersebut, terdapat 23 RW yang mengorganisir tata ruang dan pembangunan di tingkat yang lebih besar, sementara jumlah RT mencapai 139 unit yang menjadi unit terkecil dalam struktur administratif di wilayah tersebut. Setiap Dusun

memiliki peran dan ciri khasnya sendiri dalam mempertahankan keberlangsungan kelurahan secara keseluruhan (Purwodadi, 2020).

Kelurahan Purwodadi yang terletak di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan adalah sebuah wilayah yang dihuni sebanyak 22.827 jiwa. Dalam populasi tersebut, terdapat perincian penduduk sebanyak 11.231 individu adalah laki-laki, sementara 11.596 individu lainnya adalah perempuan. Data ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di wilayah ini (Grobogan D. K., 2023). Peneliti juga mengklasifikasikan penduduk Kelurahan Purwodadi berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin masing-masing individu. Data klasifikasi ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai struktur demografis wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan untuk memahami distribusi usia penduduk serta perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di berbagai rentang usia. Analisis demografis yang mendalam seperti ini menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Berikut hasil yang telah peneliti klasifikasian sebagai berikut:

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	613	561	1,174
5-9	804	793	1,597
10-14	999	831	1,830
15-19	967	935	1,902
20-24	928	880	1,808
25-29	831	777	1,608
30-34	757	774	1,531
35-39	856	851	1,707
40-44	882	900	1,782
45-49	816	824	1,640
50-54	716	789	1,505
55-59	635	806	1,441
60-64	565	725	1,290
65-69	411	472	883
70-74	240	317	557
>=75	211	361	572
Jumlah	11,231	11,596	22,827

Tabel 3. 1 Klasifikasi Usia Masyarakat Kelurahan Purwodadi

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil mendata sebanyak total 10.018 penduduk yang belum menikah, dimana memiliki kontribusi paling besar terhadap status perkawinan di Kelurahan Purwodadi. Perincian dari jumlah tersebut menunjukkan 5.452 laki-laki dan 4.566 perempuan yang belum menikah, memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi gender dalam konteks status perkawinan di wilayah tersebut. Data ini memiliki peran penting dalam memahami struktur sosial masyarakat lokal serta menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan sosial, pendidikan, dan program lain yang mungkin mempengaruhi atau memperbaiki kondisi sosial di Kelurahan Purwodadi (Grobogan D. K., 2023).

Hasil klasifikasi berdasarkan status perkawinan dan jumlah kepala keluarga pada semester kedua tahun 2022 memberikan informasi rinci mengenai struktur keluarga dan kehidupan rumah tangga di wilayah tersebut. Analisis lebih lanjut terhadap data ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perkembangan sosial, ekonomi, dan mungkin juga kesehatan di lingkungan Kelurahan Purwodadi. Berdasarkan data ini, pemahaman yang lebih mendalam tentang status perkawinan dan struktur keluarga di Kelurahan Purwodadi menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial serta kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Berikut hasil klasifikasi data tabel yang telah peneliti uraikan berdasarkan status perkawinan dan jumlah kepala keluarga:

Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Kepala Keluarga
Laki-laki	5,452	5,123	328	328	5,943
Perempuan	4,566	5,267	465	1,298	2,113
Jumlah	10,018	10,390	793	1,626	8,056
Persentase	43,89%	45,52%	3,47%	7,12%	100%

Tabel 3. 2 Status Pernikahan Masyarakat Kelurahan Purwodadi

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, 2023

Kelurahan Purwodadi, sebagai sebuah unit administratif di wilayahnya, menampilkan gambaran yang kompleks dalam hal demografi dan keragaman kepercayaan. Data terkini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa populasi di Kelurahan ini mencapai 22.827 individu. Dari jumlah tersebut, terdapat 11.231 laki-laki dan 11.596 perempuan, serta dihuni oleh 8.056 kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam

menghidupi keberlangsungan keluarganya. Selain itu, aspek keberagaman kepercayaan turut menjadi ciri khas, di mana Kelurahan Purwodadi mencatat adanya kehadiran 7 aliran kepercayaan yang berbeda yang tercatat secara resmi (Grobogan D. K., 2023).

Dalam tabel dibawah ini, konteks kehidupan sosial dan keagamaan yang terlampir merinci jumlah penduduk berdasarkan penganut sistem kepercayaan di Kelurahan Purwodadi. Data tersebut menjadi penting dalam merumuskan pemahaman mendalam tentang pluralitas keagamaan dan keragaman budaya yang ada di wilayah tersebut. Keberagaman aliran kepercayaan yang terdokumentasi mencerminkan lanskap sosial yang dinamis dan kompleks, yang memerlukan pemahaman yang mendalam serta kerangka kerja yang inklusif dalam mengelola kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang demografi dan kepercayaan dalam Kelurahan Purwodadi tidak hanya menggambarkan aspek populasi, tetapi juga menjadi landasan penting dalam memahami dinamika sosial dan kultural yang mengakar di tengah-tengah masyarakat lokal. Dalam melihat populasi data kepercayaan penduduk Kelurahan Purwodadi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jenis Kelamin	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu	Aliran Kepercayaan
Laki-laki	9943	895	314	10	25	3	1
Perempuan	10187	984	376	8	30	5	0
Jumlah	20130	1879	690	18	55	8	1

Tabel 3. 3 Status Keagamaan Masyarakat Kelurahan Purwodadi

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, 2023

3. Pejabat Pemerintahan Kelurahan Purwodadi



Gambar 3. 2 Kelurahan Purwodadi

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2023

Kelurahan Purwodadi dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang dipilih oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah, jabatan sebagai kepala kelurahan adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat yang memiliki masa jabatan bergantung pada statusnya sebagai PNS. Berdasarkan struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Purwodadi diketahui bahwasanya memiliki jumlah perangkat kelurahan di Kantor Kelurahan Purwodadi sejumlah 22 orang, diantaranya perangkat desa dengan perincian jabatan struktural berjumlah 5 orang, serta 7 orang staf, dan 10 orang sebagai tenaga lepas harian. Berikut susunan tabel pejabat pemerintahan Kelurahan Purwodadi:

NO	Nama	Penempatan
1	Hendro Sutopo, SH	Kepala Kelurahan
2	Sry Suarninengsih, S.sos, MA	Sekretaris Kelurahan
3	Sukardi	Kasi Pem Dan Trantribum

4	Susilowati,SE	Kasi Pemberdayaan dan Kesra
5	Hari Widodo	Kasi Pelayanan Umum
6	Supadmi	Staf
7	Eny Setianingsih	Staf
8	Soelekah	Staf
9	Moch Moeslih	Staf
10	Partimah	Staf
11	Sungkono	Staf
12	Suparyono	Staf
13	Dwi Wahyu Maharani, SE	Tenaga Harian Lepas
14	Thomy Ericha Kurniawan	Tenaga Harian Lepas
15	Muhamad Yusuf	Tenaga Harian Lepas
16	Dita Putri Amanda	Tenaga Harian Lepas
17	Eko Danu Ari Wibowo	Tenaga Harian Lepas
18	Tyas Sari Pramuciptani	Tenaga Harian Lepas
19	Dwi Indah Riyanti	Tenaga Harian Lepas
20	Retnowati	Tenaga Harian Lepas
21	Nugroho Adi Kuncoro	Tenaga Harian Lepas
22	Sugito	Tenaga Harian Lepas

Tabel 3. 4 Pejabat Pemerintahan Kelurahan Purwodadi

Sumber: Keputusan Camat Purwodadi, 2016

B. Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan sekadar sebuah proses administratif, namun sebuah indikator krusial dari kedewasaan demokrasi suatu negara. Hal

ini karena Pilkada menjadi panggung utama bagi partisipasi publik dalam menentukan pemimpin mereka secara langsung, menggambarkan esensi proses demokratisasi yang diterapkan dalam sebuah sistem politik (Sutrisno 2017:36). Menekankan bahwa kesuksesan pelaksanaan Pilkada memiliki peran signifikan dalam menentukan kualitas dan stabilitas demokrasi di suatu negara yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan pemerintahan. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi sebuah proses pemilihan pemimpin lokal, tetapi juga menjadi cermin bagi kualitas serta kedewasaan sebuah negara dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasarinya.

KPU Kabupaten Grobogan memulai proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada 2020 pada tanggal 4 September 2020, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU No 5 Tahun 2020. Tahapan ini direncanakan berlangsung selama tiga hari hingga tanggal 6 September 2020. Pada hari pembukaan pendaftaran, hanya satu pasangan calon, yakni Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto, yang mendaftar sekitar pukul 15.00 WIB. Evaluasi terhadap berkas persyaratan mereka menunjukkan bahwa pasangan calon tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan KPU (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2020).

Dalam pelaksanaan pendaftaran, Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo, menegaskan bahwa proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU No 9 Tahun 2020. Protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 menjadi fokus utama, sesuai dengan Peraturan KPU No 10 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan selama pelaksanaan Pilkada di tengah kondisi bencana non-alam Covid-19. Adapun hal ini sebagai upaya dalam memastikan kelancaran proses pemilihan sambil tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan publik (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2020).

Pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Grobogan merupakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Kabupaten Grobogan menjadi salah satu kabupaten yang mengalami kejadian terdapat calon tunggal pada saat itu, kehadiran calon tunggal dalam Pilkada Grobogan memengaruhi dinamika kampanye dan interaksi politik secara signifikan. Pasangan calon tersebut harus tetap melakukan kampanye meskipun tanpa adanya pesaing. Fokus utama kampanye terletak pada mempertahankan dan meningkatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat serta memperkenalkan rencana dan program kerja yang akan dilaksanakan selama masa jabatan mendatang.

Ketika hanya ada satu pasangan calon, kegiatan kampanye cenderung lebih terfokus pada sosialisasi program kerja dan visi-misi bagi pemilih. Selain itu, peran media massa dan sosial juga menjadi penting dalam memastikan pesan-pesan dari calon tunggal dapat tersebar luas dan mencapai pemilih potensial. Dinamika debat publik dan pertemuan terbuka antara calon dengan masyarakat menjadi momen penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana kerja yang akan dilakukan. Dalam situasi calon tunggal, tingkat partisipasi pemilih menjadi hal yang menjadi sorotan. Meskipun hanya ada satu pilihan, kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara tetap menjadi indikator penting dari tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dukungan yang besar terhadap calon tunggal dapat tercermin dalam tingginya tingkat partisipasi pemilih saat hari pemungutan suara. Hal ini menunjukkan kepercayaan dan dukungan yang kuat terhadap visi dan program yang diusung oleh pasangan calon yang aklamasi tersebut.

C. Profil Pasangan Calon Tunggal Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto

Calon Bupati Sri Sumarni lahir di Grobogan pada tanggal 5 September 1960, yang beralamat di Jl. Gatot Soebroto No.6 Purwodadi. Beliau menempuh sekolah dasar di SD Negeri 1 Karang Sari Tahun 1967-1973, kemudian melanjutkan di SMP PEMDA Brati Tahun 1974-1977, dilanjutkan menempuh di SMA Pembangunan Persiapan Tahun 1978-1981, setelah itu beliau melanjutkan studi S1 nya di Universitas Muria Kudus Tahun 2004-2008, dan juga melanjutkan S2 di Universitas Slamet Riyadi Tahun 2009-2011 (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2022).

Sebelum menjadi Gubernur Kabupaten Grobogan beliau pernah bekerja sebagai kasir di KUD Pakis Aji pada tahun 1982 hingga 1992. Perjalanan karirnya terus berkembang dengan posisi sebagai Manager KUD Pakis Aji dari tahun 1993 hingga 2003, serta sebagai Distributor di KUD Pakis Aji Jaya dari tahun 2000 hingga 2003. Tak berhenti di situ, beliau kemudian meniti karirnya sebagai Komisaris CV. Tani Jaya Perkasa sejak tahun 2006 hingga saat ini. Namun, tak hanya dunia bisnis yang menjadi panggungnya, beliau juga terlibat dalam ranah politik dengan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari tahun 2004 hingga 2012. Peran politiknya semakin terangkat dengan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Grobogan pada periode 2012 hingga 2016. Dan dari tahun 2016 hingga 2021, beliau telah mendedikasikan dirinya sebagai Bupati Grobogan. Kiprahnya yang tak kenal lelah dalam memajukan daerahnya terus berlanjut hingga periode Bupati Grobogan saat ini, yang dimulai dari tahun 2021 hingga 2024 (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2022).

Beliau juga menerima penghargaan seperti RAKORNAS PDI Perjuangan Tahun 2007, kemudian sebagai peserta BINTEK Revitalisasi penerapan UU Sektor Ketenagakerjaan Lembaga Pengkajian Kinerja Pembangunan Tahun 2007, adapun beliau mendapat penghargaan Lokakarya Penggunaan Pupuk Berimbang Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia 2002, dilain sisi beliau juga pernah mendapat penghargaan disaat Pertemuan Nasional Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Se-Indonesia ADKASI Tahun 2004 (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2022).

Calon Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto lahir di Grobogan pada tanggal 19 Agustus 1960, beliau bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No.52 RT 02 RW 015 Kec. Purwodadi. Beliau pernah menempuh pendidikan Dasar di SD Negeri Plosorejo Pada tahun kelulusan 1973, lalu dilanjutkan di SMPN Wirosari dengan tahun kelulusan 1976, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di SMAN 2 Grobogan yang lulus pada tahun 1980, Setelah itu beliau melanjutkan studi S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro yang lulus pada tahun 1987, kemudian mengambil S2 di Universitas yang sama dengan mengambil jurusan di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat serta lulus pada tahun 2009 (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2022).

Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam bidang medis dan pelayanan kesehatan. Dimulai sebagai dokter jaga di RS Roemani dan RS Panti Wilasa dari Februari 1987 hingga Februari 1988, kemudian menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kradenan II dari November 1987 hingga Maret 1993. Setelah itu, beliau menjadi dokter di RS Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi dari Maret 1993 sampai Desember 2001, lalu menjabat sebagai Kepala Subbagian Kesekretariatan dan Rekam Medik di RS yang sama dari Desember 2001 hingga Mei 2003. Selanjutnya, beliau menempati posisi Sekretaris di RS Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi dari Mei 2003 hingga Desember 2008 sebelum menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dari Desember 2008 hingga Juli 2012. Kemudian, beliau menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi dari Juli 2012 hingga Maret 2020, sebelum akhirnya terpilih sebagai Wakil Bupati Grobogan untuk periode 2021 – 2026 (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2022).

Beliau memiliki catatan panjang dalam berbagai jabatan organisasional yang menandai kontribusinya yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejak masa kepemimpinannya sebagai Ketua Ikatan Remaja Masjid Raya Candi Lama dari tahun 1982 hingga 1985, beliau telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan komunitas lokal. Selain itu, perannya yang signifikan terlihat dari kepemimpinan ganda sebagai Ketua POBSI Kabupaten Grobogan selama dua periode, yakni dari tahun 2005

hingga 2009, serta dari tahun 2009 hingga 2013. Tak hanya itu, dedikasinya terhadap olahraga terlihat melalui perannya sebagai Penasehat POBSI Kabupaten Grobogan selama empat tahun berturut-turut, dari tahun 2013 hingga 2021. Selain itu, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pengurus Besar IDI cabang Grobogan selama sembilan tahun dari tahun 2012 hingga 2021, beliau turut aktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Tak ketinggalan, kontribusinya terhadap generasi muda terlihat melalui perannya sebagai Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada Kabupaten Grobogan dari tahun 2009 hingga 2012.

BAB IV

ANALISIS PERILAKU RASIONAL PEMILIH GOLPUT PADA PILKADA KABUPATEN GROBOGAN DI KECAMATAN PURWODADI TAHUN 2020

Bab ini mencakup mengenai hasil dari analisis perilaku rasional pemilih pada Pilkada 2020 di Kelurahan Purwodadi. Dimana perilaku memilih rasional ini sebenarnya merupakan ekspresi dari sebuah sistem demokrasi dan ekonomi yang mapan. Adapun relasi kausalitas tersebut menunjukkan bahwa rasionalitas pemilih itu juga disebabkan karena pengaruh paradigma supply and demand dalam ekonomi terlebih lagi bagaimana para politisi mengelola kebijakan ekonomi dan dampaknya (Duch & Stevenson, 2005). Hal tersebut yang berdampak evaluasi kritis pemilih baik yang bersifat retrospektif maupun prospektif (McAllister, Sheppard, & Bean, 2015). Adapun analisa retrospektif adalah upaya pemilih untuk bisa melihat ke belakang apa yang telah dicapai dan dampak ekonominya yang ditimbulkan. Sedangkan analisa prospektif lebih tertuju pada upaya pemilih untuk melihat secara kritis berbagai program yang ditawarkan oleh kandidat maupun partainya. Berbagai indikator kebijakan yang menggambarkan keadaan ekonomi mikro misalnya pengangguran maupun pendapatan perkapita menjadi faktor evaluasi penting bagi pemilih rasional (Bingham Powell & Whitten, 1993) (Jati, 2023).

A. Perilaku Golput Didalam Masyarakat Kelurahan Purwodadi Pada Pilkada 2020

Kelurahan Purwodadi merupakan salah satu dari beberapa kelurahan yang terletak di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis, wilayah Kelurahan Purwodadi memiliki letak yang strategis karena berada di pusat Kecamatan Purwodadi. Kelurahan ini terkenal karena menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan layanan publik di sekitar Kecamatan Purwodadi. Kelurahan Purwodadi dilengkapi dengan sarana pendidikan yang cukup memadai (Grobogan B. P., 2023).

Kelurahan Purwodadi sendiri memiliki DPT terbanyak di wilayah Kecamatan Purwodadi, dimana terdapat 17.688 individu yang tercatat dalam DPT di wilayah Kelurahan Purwodadi. Dari banyaknya jumlah DPT yang ada sebanyak 3.212 individu yang tidak ikut dalam menggunakan hak nya sebagai pemilih, hal ini terdiri dari 1.714 laki-laki yang tidak memilih dan 1.498 perempuan yang melakukan hal yang sama. Adanya tingkat golput yang tergolong paling tinggi di Kelurahan Purwodadi mengindikasikan adanya peranan yang tidak sesuai didalam pelaksanaan sebuah pemilihan, hal ini seharusnya tidak terjadi sebab Kelurahan Purwodadi merupakan pusat aktivitas di Kecamatan Purwodadi. Meskipun memiliki populasi yang cukup besar, sebagian besar masyarakat kelurahan tampaknya enggan atau

kurang antusias untuk berpartisipasi dalam proses politik, terutama dalam pemilihan umum (KPU, 2020).

1. Golput karena Pandemi Covid-19

Kasus pandemi covid-19 memang menjadi pengaruh pada setiap lini kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada saat terjadinya pemilu, di Kabupaten Grobogan sendiri terdapat 6.546 orang yang telah terkonfirmasi terjangkit virus corona, diantaranya terdapat 688 orang yang meninggal dikarenakan virus tersebut (AndraFarm, 2023). Dalam keterangan Pak Saroni selaku ketua PPS di Kelurahan Purwodadi sendiri memang banyak warga di Kelurahan Purwodadi yang memilih untuk golput pada Pilkada 2020, dimana hal ini berkaitan dengan adanya kasus pandemi Covid-19. Berikut hasil wawancara saya mengenai masyarakat Kelurahan Purwodadi yang memilih golput pada saat Pilkada 2020:

“Memang benar banyak warga yang memilih untuk golput, saya sangat menyadari pentingnya hak suara dalam menentukan masa depan daerah. Namun dilain sisi situasi pandemi Covid-19 pada saat itu membuat masyarakat khawatir akan kesehatan mereka. Para orang tua yang memiliki kerentanan terhadap virus ini dan pergi untuk ke tempat pemungutan suara bisa menjadi risiko yang dapat terjadi” (Saroni, 2023).

Hal ini diperkuat dengan sesi wawancara peneliti dengan Rizal selaku masyarakat Kelurahan Purwodadi, sebagai berikut:

“Saat itu situasi pandemi mas, saya mempertimbangkan akan diri saya dan keluarga karena khawatir akan risiko terkena Covid-19 saat itu. Jumlah kasus tiap hari meningkat soalnya mas disini, saya merasa risiko pergi ke tempat pemungutan suara lebih besar dibanding manfaat dari hak pilih saya sendiri, saya sayang keluarga saya mas” (Rizal, 2023).

Dalam wawancara yang sama bersama Mbak Deyani, dirinya juga mengalami ketakutan ketika masa pandemi Covid-19 dimana hal ini berpengaruh terhadap perilaku pemilihan dirinya dan keluarganya pada saat Pilkada 2020 sedang berlangsung, berikut wawancara peneliti:

“saya bukan tidak mau menggunakan hak saya sebagai pemilih ya mas, disini saya memiliki kecemasan terhadap adanya corona ini, dimana saya memilih untuk berdiam diri dirumah ketika adanya Pilkada, sebab banyaknya masyarakat yang terpapar akibat Covid-19 ini kan mas” (Deyani, 2023).

Banyak orang merasakan kekhawatiran yang mendalam saat hendak memenuhi tanggung jawab mereka dalam memilih pada Pilkada 2020, terutama dengan kehadiran ancaman pandemi Covid-19 yang membuat mereka dan keluarga merasa sangat khawatir. Keadaan yang membingungkan terkait Pilkada di tengah pandemi ini bukanlah tanpa alasan, banyak masyarakat merasakan kegelisahan akan risiko penularan virus yang semakin meningkat karena kerumunan yang terjadi saat proses pemungutan suara. Kecemasan ini tak hanya menyangkut kesehatan dan keselamatan pribadi mereka, tetapi juga calon yang tengah bersaing. Selain itu, kekhawatiran ini juga meliputi keraguan terhadap penerapan protokol kesehatan yang efektif selama proses pemilihan, termasuk sulitnya menjaga penggunaan masker dan menjaga jarak sosial di tengah suasana yang penuh emosi dan antusiasme.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mbak Anisa selaku masyarakat yang tidak menggunakan hak nya sebagai pemilih, dimana dirinya saat itu terkena virus corona, berikut hasil wawancara dengan narasumber:

“Saya pribadi waktu itu mengalami gangguan kesehatan pernafasan ya mas, seperti adanya sakit tenggorokan dan juga hilangnya indra penciuman saya selama beberapa hari. Hal itu menjadikan ketakutan bagi saya pribadi untuk menghadiri pemilihan, karena takut nantinya dapat menularkan virus corona terhadap masyarakat lainnya, terutama para orang tua yang lanjut usia, dan juga orang-orang yang sistem imunnya sedang tidak bagus bisa saja kan mas, karena saya tau petugas TPS itu menjalankan tugasnya sampai malam bisa mas, takutnya saat lagi drop malah dia bisa tertular gara-gara saya mas” (Anisa, 2023).

Dengan adanya hal ini masyarakat memiliki kekhawatiran akan potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca-pelaksanaan acara pemilihan, yang berpotensi mengancam stabilitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Perihal ini telah memicu kekhawatiran yang mendalam akan dampak negatif yang mungkin terjadi pada stabilitas kesehatan masyarakat setelah event pemilihan, mengingat sulitnya menjaga protokol kesehatan di tengah situasi yang penuh dengan emosi dan semangat tersebut. Masyarakat merasa terbebani oleh ketidakpastian akan kondisi kesehatan pasca-pemilihan yang dapat membawa dampak besar terhadap kondisi kesehatan umum.

2. Kurang Sosialisasi pada Masa Pandemi

Berbagai upaya yang telah dilakukan guna mengurangi adanya golput di Kelurahan Purwodadi sendiri, seperti adanya sosialisasi antara perangkat-perangkat desa serta dilakukan secara daring agar mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang

semakin luas nantinya. Namun dilain sisi memang hal ini masih kurang efektif dalam penyampaian akan pentingnya sebuah suara setiap individu dalam acara Pilkada di setiap daerah, bukan hanya di wilayah Kelurahan Purwodadi. Hal ini disampaikan oleh Pak Saroni selaku sesi wawancara dengan peneliti:

“Untuk sosialisasi memang sudah kita lakukan terhadap warga Kelurahan Purwodadi, dimana kita memberikan sosialisasi terhadap beberapa warga saja yang seperti para ketua RT di Kelurahan Purwodadi, dilain sisi memang karena Covid-19 kita tidak bisa membuat pertemuan yang mencakup banyak para masyarakat, serta juga saat pertemuan ini dengan serangkaian protokol-protokol yang memang harus dilakukan oleh setiap peserta sosialisasi tersebut” (Saroni, 2023).

Memang adanya pandemi Covid-19 menjadi kendala terbesar saat Pilkada Grobogan Tahun 2020 di Kelurahan Purwodadi, dilain sisi Pak Saroni menambahkan mengenai adanya faktor yang mempengaruhi sulitnya sosialisasi. Berikut hasil dari wawancara peneliti dengan masyarakat:

“Dari yang saya lihat memang mas, banyak juga masyarakat yang kurang paham dalam proses pemilihan pada saat terjadinya pandemi, karena ya ada berbagai faktor yang menjadikan kita sulit menjangkau pada saat itu. Sepertinya kebutuhan internet, proses protokol yang ketat juga” (Saroni, 2023)

Adanya masyarakat yang kurang paham terhadap politik saat pemilihan kepala daerah memang dapat menjadi sebuah pengaruh terhadap Pilkada sendiri, terutama yang terjadi di Kelurahan Purwodadi, sebab suara masyarakat merupakan hal yang turut berperan dalam menentukan pemimpin daerahnya. Dimana sosialisasi mengenai pilkada 2020 dalam masa pandemi memiliki banyak kekurangan, dimana akses serta sebaran informasi yang cenderung tidak tertuju langsung pada para pemilih menjadikan hal tersebut berpengaruh terhadap sikap pemilihan.

3. Perilaku Golput karena Apatisme

Masyarakat yang acuh terhadap Pilkada di Kelurahan Purwodadi juga turut berperan dalam keputusan pemilihan kepala daerahnya, sebab setiap masyarakat memiliki suara yang harus ikut campur dalam pemilihan masa depan dari daerahnya sendiri. Berikut wawancara dengan Pak Saroni mengenai adanya masyarakat yang acuh terhadap Pilkada di kelurahan Purwodadi:

“Setiap masyarakat memiliki peran penting dalam Pilkada di daerahnya masing-masing, sebab suara mereka adalah hal yang dapat mengubah bagaimana daerah mereka kedepannya. Bagi masyarakat yang acuh

memang pasti ada di setiap tempat ataupun di setiap terjadinya pemilihan umum, tidak bisa dipungkiri ya mas, masyarakat yang acuh tersebut mungkin berpandangan bahwa politik atau pemilu itu gk ngerubah hidup mereka, padahal secara tidak langsung mereka mendapatkan pelayanan terhadap apa yang mereka pilih nantinya kan ya mas” (Sarono, 2023).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Mas Arifin, dimana dirinya memiliki sikap yang kurang percaya terhadap pemerintahan, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

“Kalo aku mas, sebenarnya kurang percaya sama pemerintahan, karena pernah waktu itu mau buat KTP dipersulit mas, saya masih inget sekali 3 bulan saya buat KTP. Dan juga ya kayak kadang kita mau apa dipersulit atau dilama-lamain pas dateng ke sananya, walaupun kayak gini gk cuma di satu daerah aja ya mas” (Arifin, 2023).

Sikap skeptis dan apatis yang umum dialami oleh masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sering kali tidak memenuhi janji-janji yang telah dibuat oleh para pemimpin. Hal ini menyebabkan rasa kekecewaan di kalangan masyarakat terhadap kepemimpinan yang seharusnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka. Di sisi lain, hal ini juga mengakibatkan pandangan yang negatif terhadap proses politik secara keseluruhan. Banyak dari mereka yang percaya bahwa proses pemilihan umum tidak mampu mengubah secara signifikan kualitas hidup mereka, sehingga menambah tingkat ketidakpercayaan dan kurangnya minat terhadap partisipasi dalam politik.

Ketidakpercayaan yang tumbuh di kalangan masyarakat terhadap pemerintah karena janji-janji yang tidak terealisasi serta sikap skeptis terhadap proses politik turut menyumbang pada suasana apatis dalam menghadapi pemilihan umum. Kebanyakan dari mereka merasa terusir dari proses politik karena keyakinan bahwa pemilihan tidak akan membawa perubahan substansial dalam kehidupan mereka. Akibatnya, tercipta siklus di mana kekecewaan terhadap kepemimpinan yang kurang responsif dan pandangan negatif terhadap proses politik saling memperkuat satu sama lain, mengurangi antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seharusnya menjadi pangkal kekuatan untuk perubahan dan perbaikan.

4. Golput karena Pekerjaan

Pekerjaan sendiri menjadikan seorang pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, dimana terkadang individu lebih mementingkan pekerjaannya ketimbang menggunakan

hak pilihnya pada saat pemilihan. Di Kecamatan Purwodadi sendiri di dominasi oleh individu yang bekerja di sektor pertanian/perkebunan dan juga karyawan swasta, dimana sektor pertanian/perkebunan sebanyak 23.055 individu dan karyawan swasta menyumbang 16.795 individu. Hal ini mengindikasikan adanya perilaku golput dikarenakan adanya faktor pekerjaan sebagai pemicu adanya perilaku untuk tidak menggunakan hak pilih seorang pemilih (Grobogan B. P., 2023).

Pekerjaan menjadi halangan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, hal tersebut merupakan karena adanya waktu yang terbuang ketika hendak pergi ke tempat pemungutan suara. Namun menurut Pak Saroni hal tersebut juga karena adanya pemilih yang bekerja diluar daerah, sebab masih adanya pemilih yang kurang paham dengan adanya sistematisa pemilihan diluar daerah bagi para pekerja transmigran. Berikut wawancara dengan Pak Saroni Sebagai Ketua PPS di Kelurahan Purwodadi:

“Menurut saya ya, memang ada hal tersebut dimana masyarakat sebagai pemilih pada Pilkada 2020 tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan pekerjaan diluar daerah, sebab mereka terkendala dengan kurangnya pengertian mengenai bagaimana cara pemilihan ataupun tempat pemilihan yang bisa mereka datangi mas, walaupun kita dari pihak KPU sudah mensosialisasikan mengenai tata cara pemilihan tersebut ya mas, kemungkinan informasi tersebut memang ada yang tidak sampai kepada masyarakat” (Saroni, 2023).

Hal tersebut diperkuat dengan hasil temuan wawancara saya dengan Mas Dian, berikut hasil wawancara tersebut:

“Saya pribadi saat itu tidak memilih karena terdapat kendala mas, saya sedang bekerja diluar daerah. Sedangkan saat itu adanya pilkada dan juga corona. Saya bekerja jauh dari lokasi tempat tinggal, dan pada hari pemilihan, sulit bagi saya untuk memilih karena jarak, waktu perjalanan, dan juga jam kerja yang panjang mas, sebab jika saya pulang hanya untuk pemilihan tersebut dari pribadi saya mungkin lebih baik tidak memilih mas ongkosnya juga lumayan untuk pulang” (Dian, 2023).

Memang adanya masyarakat yang masih kurang mengetahui tatacara melakukan pemilihan diluar daerah nya menjadikan mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dari website resmi KPU pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pindah tempat memilih atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada ajang pemilu tahun 2024. Hal ini diperbolehkan jika lokasi tempat tinggal mereka tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Aturan terkait prosedur ini

telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (KPU, 2023).

Dilain sisi pula Mas Arifin memberikan pandangannya mengenai adanya perilaku golput dikarenakan pekerjaan, dimana dirinya pribadi sedang bekerja diluar negeri pada saat itu, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

“Saya bekerja di luar negeri mas, tepatnya di Jepang. Meskipun saya sangat ingin memberikan suara saya untuk memilih pemimpin daerah, namun karena keterbatasan waktu dan jarak, saya tidak bisa pulang untuk ikut dalam proses pemilihan. Saya yang bekerja di luar negeri merasakan dilema antara kewajiban pekerjaan dan partisipasi dalam proses demokrasi. Terkadang pula mas, sulit untuk mengakses informasi terkait prosedur pemilihan atau melakukan pemungutan suara di luar negeri” (Arifin, 2023).

Didalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi pemilih yang ingin mengubah lokasi tempat pemilihan mereka dalam pemilu 2024. Prosedur yang telah ditetapkan ini memperhitungkan kondisi di mana pemilih berada di lokasi yang berbeda dengan alamat terdaftar pada KTP-el mereka. Dengan demikian, pemilih yang merasa perlu untuk memindahkan hak pilih mereka dapat mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU untuk mempermudah perubahan data dalam Daftar Pemilih Tetap. Apabila seseorang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka ia tidak bisa melakukan pemilihan saat pindah lokasi. Meskipun demikian, pemilih masih memiliki kesempatan untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terletak di wilayah tempat tinggal sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Di TPS tersebut, mereka dapat dimasukkan ke dalam (DPK) Daftar Pemilih Khusus (KPU, 2023).

Ada beberapa syarat kondisi khusus yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pemilihan ulang. Salah satunya adalah ketika seseorang sedang menjalankan tugas di lokasi lain pada hari pemungutan suara. Selain itu, ada pula kondisi di mana seseorang harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, dan dalam kasus ini, anggota keluarga yang mendampingi juga berhak untuk memilih. Orang-orang dengan disabilitas yang sedang mendapatkan perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi juga diizinkan untuk melakukan pemilihan. Begitu juga dengan mereka yang tengah menjalani rehabilitasi narkoba, serta tahanan yang berada di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan (KPU, 2023).

Faktor lainnya yaitu orang yang tengah menempuh pendidikan, pindah domisili, terkena dampak dari bencana alam, atau sedang bekerja di luar domisili mereka. Selanjutnya, ada juga keadaan tertentu di luar ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, yang tetap diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut menjadi pedoman dalam menentukan siapa saja yang berhak untuk memindahkan hak pilih mereka dalam situasi atau kondisi tertentu. Meskipun terdapat ketentuan yang jelas, namun pengaturan ini masih bersifat luwes dan dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat itu (KPU, 2023).

Pilkada 2020 di Kabupaten Grobogan merupakan pemilihan dengan calon tunggal saat pandemi Covid-19, namun dilain sisi banyak masyarakat yang enggan menggunakan hak suaranya dalam menentukan pemilihan tersebut. Walaupun dengan adanya upaya dari pemerintahan maupun pihak terkait, pada dasarnya memang masih terdapat masyarakat yang dengan kesadaran dirinya memang tidak ingin menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Grobogan tahun 2020. Namun, determinasi dari pembahasan mengenai tingginya perilaku tingkat golput masyarakat di Kelurahan Purwodadi yang memiliki tingkat kasus terbanyak pada saat terjadinya Pilkada di Kabupaten Grobogan di sebabkan karena saat terjadinya pemilihan kepala daerah banyak warga yang khawatir akan keselamatan diri dan keluarganya karena saat itu terjadi pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Serta meningkatnya para korban pandemi Covid-19 yang bisa saja tidak teridentifikasi atau tidak memiliki gejala yang akhirnya dapat menularkan sesama pemilih nantinya di tempat pemilihan suara.

B. Rasionalitas Pada Non-Voting Behavior di Kelurahan Purwodadi saat Pilkada 2020

Menurut Coleman, Teori Pilihan Rasional menggambarkan bagaimana individu atau aktor bertindak secara rasional dengan mendasarkan tindakan mereka pada tujuan tertentu, yang diukur berdasarkan nilai atau preferensi yang mereka miliki. Pendekatan utama dalam konsep pemikiran rasional yang dikemukakan oleh Coleman adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu memiliki tujuan yang disengaja, yang dibentuk oleh nilai-nilai yang mereka anut atau preferensi yang mereka yakini (Coleman, 2011).

Coleman menjelaskan bahwa ketika seseorang bertindak, mereka secara sadar dan terencana menuju pencapaian tujuan tertentu. Tujuan tersebut kemudian menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, di mana nilai-nilai atau preferensi individu memainkan peran penting dalam menentukan arah dari tindakan yang diambil. Dengan demikian, Teori Pilihan Rasional, menurut pemikiran Coleman, menggambarkan bagaimana individu secara aktif

melibatkan nilai-nilai dan preferensi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang rasional.

Pada dasarnya ketika seseorang memilih untuk golput, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan yang mereka anggap rasional berdasarkan pandangan pribadi. Meskipun demikian, pandangan tersebut sebagian besar ditentukan oleh nilai-nilai atau preferensi yang mereka anut secara individual. Oleh karena itu, dalam memilih, masyarakat cenderung memprioritaskan apa yang dianggap sesuai dengan preferensi yang ada dalam pikiran mereka. Meski memiliki alasan yang rasional menurut sudut pandang pribadi, golongan yang memilih untuk golput seringkali didorong oleh nilai-nilai atau preferensi yang mereka anut secara personal. Oleh karena itu, dalam menentukan pilihan, masyarakat cenderung lebih condong untuk memilih berdasarkan apa yang sejalan dengan preferensi yang mereka yakini.

Rasionalitas teknis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan masing-masing memecahkan masalah secara efektif. Rasionalitas ekonomis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang membandingkan berbagai alternatif atas dasar kemampuan untuk menemukan pemecahan masalah yang efisien. Selain itu adanya rasionalitas legal yang merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan alternatif menurut kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian sebelumnya. Adapun rasionalitas sosial ialah karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan alternatif menurut kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan institusi-institusi sosial yang bernilai. Dan juga rasionalitas substantif merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan berbagai bentuk rasionalitas-teknis, ekonomis, legal, sosial- dengan maksud agar dapat dibuat pilihan yang paling layak di bawah kondisi yang ada (Diesing, 1962).

1. Karakteristik Pilihan Rasionalitas Teknis Pada Masyarakat Kelurahan Purwodadi

Rasionalitas teknis adalah karakteristik dari pengambilan keputusan yang terencana dan didasarkan pada penilaian rasional terhadap berbagai alternatif yang ada. Ini melibatkan evaluasi terhadap kemampuan tiap pilihan untuk menyelesaikan masalah dengan efisiensi, dengan mempertimbangkan seberapa baik mereka dapat mengatasi situasi secara efektif. Rasionalitas teknis mempertimbangkan proses evaluasi yang didasarkan pada logika dan pemilihan yang matang terhadap opsi yang tersedia. Hal ini melibatkan penilaian terhadap sejauh mana setiap pilihan dapat menangani suatu masalah

dengan efektif, dengan tujuan menemukan solusi yang paling efisien dalam menghadapi situasi yang ada.

Adanya sebuah perilaku yang rasional yang dilakukan masyarakat Kecamatan Purwodadi merupakan hal yang wajar akan adanya sebuah pemilihan dikala pandemi Covid-19, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap Pak Saroni selaku masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan mengenai tingginya pandemi tersebut, hasil wawancara sebagai berikut:

“Memang mas dari yang saya lihat masyarakat itu memiliki orang tua yang rentan akan terkena Covid-19, ada yang memiliki penyakit bawaan seperti asma, diabetes atau penyakit bawaan lainnya. Dan saya rasa mereka berfikir untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena saat itu terjadi pandemi kan, jadinya mereka melakukan golput karena hal itu mas” (Saroni, 2023).

Dari hasil wawancara Mas Rizal pun menjelaskan mengenai pandangan dirinya mengenai banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya rasa takut akibat kurang ketatnya protokol maupun adanya masyarakat yang terkadang masih tidak mempercayai akan berbahayanya pandemi ini, berikut hasil wawancara tersebut:

“Saya memiliki banyak pertimbangan dalam menjaga keluarga saya mas, memang saat itu partisipasi masyarakat menurun karena adanya pandemi, dilain sisi pula banyak masyarakat yang terjangkit akibat virus corona mas, makannya saya memilih untuk tidak menggunakan hak pilih saya karena dirumah saya terdapat orang tua saya yang sudah rentan, lalu ada anak saya yang masih kecil juga. Bukannya saya tidak ingin ikut berpartisipasi namun konsekuensi tertular saat masa pemilihan tersebut lebih besar ketimbang saat saya bekerja ataupun saat saya sedang keluar, sebab kan tau sendiri mas kalo di TPS antusiasnya gimana masyarakat” (Rizal, 2023)

Dilain sisi Pak Arba juga merasakan dampak dari adanya covid-19, dimana dirinya enggan untuk memilih didasari pada keadaan dirinya sedang terjangkit virus corona. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Keadaan sih mas yang buat saya tidak memilih, saya waktu itu terkena covid 2 kali mas, sampai pernah di isolasi sendirian mas. Keluarga saya juga ada yang kena waktu itu, kakak saya terkena juga akhirnya saya tidak dapat menggunakan hak pilih saya mas” (Arba, 2023).

Hal tersebut juga dirasakan oleh Mbak Anisa yang merupakan masyarakat Kelurahan Purwodadi, dimana dirinya menyampaikan terkena virus corona yang menjadikan dirinya golput pada saat itu, berikut hasil wawancara tersebut:

“Saya pribadi waktu itu mengalami gangguan kesehatan pernafasan ya mas, seperti adanya sakit tenggorokan dan juga hilangnya indra penciuman saya selama beberapa hari. Hal itu menjadikan ketakutan bagi saya pribadi untuk menghadiri pemilihan, karena takut nantinya dapat menularkan virus corona terhadap masyarakat lainnya, terutama para orang tua yang lanjut usia, dan juga orang-orang yang sistem imunnya sedang tidak bagus bisa saja kan mas, karena saya tau petugas TPS itu menjalankan tugasnya sampai malam bisa mas, takutnya saat lagi drop malah dia bisa tertular gara-gara saya mas” (Anisa, 2023).

Dari hasil wawancara tersebut memberikan pandangan adanya sikap rasionalitas teknis yang menyebabkan masyarakat memilih tidak menggunakan hak pilihnya, karena terkadang masih terdapat masyarakat yang enggan untuk memakai masker yang belum tentu dirinya sehat, bisa saja dirinya menjadi orang yang menularkan virus Covid-19. Padahal ini masyarakat kebanyakan tidak mengikuti pilkada 2020 karena alasan adanya pandemi yang menyebabkan dirinya tidak memilih, sebab rentannya masyarakat yang berusia lanjut menjadikan hal tersebut juga membuat kecemasan terhadap keluarga mereka.

2. Karakteristik Pilihan Rasionalitas Eknomis Pada Masyarakat Kelurahan Purwodadi

Rasionalitas ekonomis memperlihatkan ciri khas dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada perbandingan berbagai opsi. Dalam hal ini, individu atau entitas mengutamakan kemampuan menyelesaikan masalah secara efisien sebagai landasan utama. Hal ini melibatkan kemampuan untuk secara logis mengevaluasi berbagai alternatif yang tersedia guna mencapai hasil optimal dalam menyelesaikan suatu masalah atau situasi yang dihadapi.

Dengan fokus pada evaluasi alternatif-alternatif yang ada, rasionalitas ekonomis menekankan pentingnya memilih solusi yang paling masuk akal untuk menyelesaikan suatu masalah. Proses ini melibatkan pemikiran yang logis dan cermat dalam mempertimbangkan berbagai pilihan yang ada, sehingga memungkinkan individu atau entitas untuk mencapai hasil yang paling efisien dalam menyelesaikan suatu situasi tertentu. Dari pandangan Pak Saronu selaku ketua PPS dirinya memberikan penjelasan mengenai adanya masyarakat yang memiliki pekerjaan diluar daerah, berikut hasil wawancara tersebut:

“Menurut saya ya, memang ada hal tersebut dimana masyarakat sebagai pemilih pada Pilkada 2020 tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan pekerjaan diluar daerah, sebab mereka terkendala dengan kurangnya pengertian mengenai bagaimana cara pemilihan ataupun tempat pemilihan yang bisa mereka datangi mas, walaupun kita dari pihak KPU sudah mensosialisasikan mengenai tata cara pemilihan tersebut ya mas, kemungkinan informasi tersebut memang ada yang tidak sampai kepada masyarakat” (Saron, 2023).

Adanya sikap pemilih yang berdasarkan pada rasionalitas ekonomis di wilayah Kelurahan Purwodadi bisa saja terjadi sebab menurut masyarakat dalam sesi wawancara bersama Mas Dian, pernyataan mengenai adanya pekerjaan sebagai hal yang menjadikan pemilih untuk tidak memilih, berikut hasil wawancara tersebut:

“Saya pribadi saat itu tidak memilih karena terdapat kendala mas, saya sedang bekerja diluar daerah. Sedangkan saat itu adanya pilkada dan juga corona. Saya bekerja jauh dari lokasi tempat tinggal, dan pada hari pemilihan, sulit bagi saya untuk memilih karena jarak, waktu perjalanan, dan juga jam kerja yang panjang mas, sebab jika saya pulang hanya untuk pemilihan tersebut dari pribadi saya mungkin lebih baik tidak memilih mas ongkosnya juga lumayan untuk pulang” (Dian, 2023).

Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Mas Arifin yang mendasari dirinya melakukan tindakan tidak memilih karena alasan pekerjaan diluar, dirinya kesulitan untuk mendapat akses informasi dalam bagaimana memilih diluar negeri:

“Saya bekerja di luar negeri mas, tepatnya di Jepang. Meskipun saya sangat ingin memberikan suara saya untuk memilih pemimpin daerah, namun karena keterbatasan waktu dan jarak, saya tidak bisa pulang untuk ikut dalam proses pemilihan. Saya yang bekerja di luar negeri merasakan dilema antara kewajiban pekerjaan dan partisipasi dalam proses demokrasi. Terkadang pula mas, sulit untuk mengakses informasi terkait prosedur pemilihan atau melakukan pemungutan suara di luar negeri” (Arifin, 2023)

Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah seringkali terhambat oleh kebutuhan mereka terhadap pekerjaan. Kehadiran pekerjaan yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka cenderung enggan berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Kendala seperti jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan waktu menjadi faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, lebih memilih untuk memusatkan perhatian pada tugas pekerjaan mereka daripada meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir dalam proses

pemilihan kepala daerah. Tuntutan dari pekerjaan seringkali menjadi hal yang menghalangi partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Kehadiran pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat sering menjadi alasan utama mengapa mereka enggan hadir dalam proses pemilihan tersebut. Faktor-faktor seperti jarak yang jauh dan pembatasan waktu menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, khususnya di kalangan generasi muda, yang lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan mereka daripada meluangkan waktu dan energi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

3. Karakteristik Pilihan Rasionalitas Legal Pada Masyarakat Kelurahan Purwodadi

Rasionalitas legal merupakan sebuah proses yang mencakup pemilihan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Dalam proses ini, terlibatlah perbandingan antara berbagai opsi, disesuaikan dengan kerangka hukum yang berlaku. Pentingnya proses ini tercermin dari keputusan yang diambil yang harus mempertimbangkan kesesuaian dengan aturan yang ada. Selain itu, proses ini juga mempertimbangkan panduan dari penyelesaian kasus serupa di masa lalu, menegaskan pentingnya referensi pada pengalaman sebelumnya dalam konteks hukum.

Keputusan yang diambil dalam konteks rasionalitas legal tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga mengacu pada pengalaman sebelumnya dalam menyelesaikan kasus serupa. Dengan melibatkan perbandingan antara opsi-opsi yang tersedia dan mempertimbangkan penyelesaian kasus serupa di masa lalu, proses ini menjadi lebih holistik. Oleh karena itu, aspek pertimbangan yang mencakup hukum yang berlaku serta panduan dari sejarah kasus memberikan dasar yang kokoh untuk pengambilan keputusan yang berkesinambungan dalam ranah hukum.

Dari adanya perilaku pemilih menurut Pak Saroni selaku ketua PPS Kelurahan Purwodadi, beliau menyampaikan dalam wawancara peneliti dengan dirinya bahwa masih terdapat para pemilih yang memang menggunakan hak pilihnya yang didasari karena kasadaran mereka terhadap politik di Indonesia. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Ya saya melihat memang masih banyak adanya kesadaran dari masyarakat Kelurahan Purwodadi terhadap keterlibatan mereka untuk melakukan hak pilihnya pada Pilkada 2020, sebab ada masyarakat pernah menyampaikan ke saya pribadi sembari ngobrol santai, bahwa harus ada memang kesadaran hukum atau kewajiban warga negara di kalangan masyarakat terkait hak dalam proses pemilihan. Semakin banyak pendidikan dan informasi tentang hak suara serta tanggung jawab sebagai warga negara, semakin banyak pula masyarakat yang sadar dengan pentingnya menggunakan hak pilih suara tersebut mas, ya

walaupun memang kita lihat angka golput tersebut bisa dikatakan cukup banyak namun masih ada masyarakat yang sadar akan dirinya sebagai warga negara yang baik” (Sarono, 2023).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sebagian masyarakat di Kelurahan Purwodadi tetap menggunakan hak pilihnya karena mengidentifikasi diri sebagai bagian yang relevan dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Mereka berharap agar pemerintahan yang terpilih mampu menciptakan kondisi yang lebih baik ke depannya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pilihan mereka. Keterlibatan aktif ini menjadi landasan bagi partisipasi politik di tingkat lokal, yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan kepada individu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik di daerahnya dapat menjadi pendorong bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tindakan tersebut bisa menjadi contoh atau dukungan moral bagi individu yang merasa pengaruh mereka tidak signifikan dalam proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada yang tidak menggunakan hak pilihnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam politik di tingkat lokal dapat memberikan dorongan bagi partisipasi yang lebih luas.

Dapat ditarik kesimpulan adanya bentuk rasional didalam perilaku tidak memilih di masyarakat Kelurahan Purwodadi memiliki banyak karakteristik perilaku pemilih rasional, dimana adanya perilaku rasional teknis, dan ekonomis. Dalam hal ini adanya pemilih rasional di Kelurahan Purodadi memiliki dominan terhadap bentuk rasionalitas teknis, dimana adanya ketakutan serta rasa cemas akan adanya pandemi Covid-19 di Kelurahan Purwodadi, hal ini menjadikan pemilih memiliki perilaku tidak memilih atau non-voting behavior. Hal ini lah yang menjadikan tingginya tingkat golput pada Pilkada 2020 di Kelurahan Purwodadi yang menjadikan sebagai kelurahan yang memiliki tingkat golput tertinggi di wilayah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

C. Perilaku Irasional didalam Pemilih Golput di Kelurahan Purwodadi

Manusia sebagai makhluk yang menggunakan bahasa sebagai alat utama berpikirnya, seringkali terjebak dalam pola pikir yang menghasilkan gangguan emosi. Ketika pikiran terkait dengan emosi, terjadilah penyebaran pikiran irasional yang berkelanjutan, memicu gangguan emosi pada individu tersebut. Kondisi terganggunya seseorang ini mendorongnya untuk merawat perilaku yang tidak masuk akal dengan cara memasukkan kata-kata, gagasan, dan pola pikir yang tak masuk akal ke dalam dirinya. Hal ini dikenal sebagai self-verbalizations, di mana kata-kata yang terus-menerus diucapkan atau dipikirkan tentang dirinya sendiri menjadi bagian dari identitasnya. Namun, gangguan emosi yang dialami

seseorang tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor luar seperti lingkungan atau peristiwa yang terjadi. Lebih tepatnya, gangguan emosi ini lebih dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap situasi atau hubungannya dengan situasi tersebut. Persepsi ini kemudian tercermin dalam bentuk kalimat negatif yang menciptakan kecemasan dan tanggapan tidak menyenangkan. Emosi negatif ini disampaikan melalui kalimat-kalimat berbahasa, yang secara berulang 'disuntikkan' ke dalam dirinya sendiri hingga akhirnya menjadi keyakinan yang kuat. Dalam konteks ini, munculnya irrational beliefs atau keyakinan-keyakinan yang tidak masuk akal, terus dipercayai, dan ditanamkan secara berulang dalam diri individu (Sasmita, 2015).

Pada jurnal yang ditulis oleh Paulus (2015) Menurut teori Cognitive Therapy yang dikemukakan oleh Aaron T. Beck, gangguan emosional dan perasaan dalam diri seseorang disebabkan oleh distorsi dalam proses berpikir. Beck mengidentifikasi distorsi kognitif sebagai kesalahan dalam berpikir yang secara langsung memengaruhi emosi, perasaan, dan tindakan individu. Salah satu contoh konkret dari kesalahan berpikir ini dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aaron T. Beck dan Marjorie E. Weishaar pada tahun 1989, yang menguraikan beberapa bentuk kesesatan berpikir yang sering terjadi. Distorsi kognitif, menurut Aaron T. Beck, merupakan perangkat yang mempengaruhi cara individu memandang dunia dan diri sendiri. Beck dan Weishaar (1989) menyajikan beberapa contoh konkret mengenai distorsi berpikir ini, yang dapat mempengaruhi perilaku dan respons emosional seseorang. Menurut pandangan mereka, pengenalan dan pemahaman terhadap kesalahan-kesalahan dalam berpikir tersebut merupakan langkah awal dalam proses terapi kognitif untuk membantu individu mengatasi gangguan emosional yang mereka alami (Sasmita, 2015).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, adanya rasionalitas sosial dalam perilaku tidak memilih berdasar pada perilaku sosial yang terjadi di masyarakat Kelurahan Purwodadi, berikut hasil wawancara tersebut terkait perilaku sosial masyarakat dalam pengaruh golput pada Pilkada menurut Pak Saron:

“Di masyarakat Kelurahan Purwodadi sendiri, konteks komunikasi sosial memang tidak dapat terlepas mas, seperti adanya omongan antara keluarga atau sesama teman mau memilih siapa ataupun tidak memilih pasti ada omongan ketika interaksi itu terjadi kan, namanya keluarga pasti ada omongan sama anak atau sama ibu dan bapaknya tentang pemilu kan mas” (Saron, 2023).

Hasil wawancara bersama salah satu masyarakat Kelurahan Purwodadi, dimana dirinya tidak memilih karena teman sebayanya yang tidak ikut dalam pemilihan, berikut hasil wawancara bersama Mas Gunawan:

“Saat pemilihan itu saya enggan menggunakan hak pilih saya mas, karena adanya pandangan saya dan teman-teman saya yang sama yakni kita kurang yakin dengan apa yang kedepannya terjadi pada pemerintahan ini, karena kita liat kan cuma satu calon yang maju. Jadi saya ikut temen-temen sekalian juga karena masih adanya keraguan saya soal ikut memilih tersebut mas” (Gunawan, 2023).

Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi dari sikap ketidakrasionalan atau irasional yang dilakukan oleh pemilih dimana mengikuti teman ataupun sanak keluarganya yang tidak menggunakan hak pilihnya didalam pemilihan. Adanya indikasi bentuk irasionalitas pemilih di Kelurahan Purwodadi menjadikan terdapatnya sikap yang tidak rasional dalam adanya sebuah pemilihan publik di suatu daerah di Indonesia. Sebab hal ini tentu saja dapat berakibat pada perilaku pemilihan yang ada di Indonesia, adanya sumbangsih ketidakrasionalan seorang pemilih dalam menentukan pilihan dirinya.

Pada tingkat fundamental perilaku rasional dalam konteks pemilihan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat. Individu-individu dalam masyarakat secara alami terlibat dalam interaksi dan komunikasi yang berkelanjutan. Keterikatan ini memainkan peran penting dalam membentuk preferensi serta pilihan mereka, terutama dalam lingkungan keluarga. Ketika anggota keluarga berbagi pandangan atau preferensi yang serupa terhadap calon pemimpin atau pasangan calon dalam sebuah pemilihan umum, hal itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sebaliknya, ini menggambarkan adanya saling pengaruh di antara individu-individu di dalam lingkungan yang dekat secara sosial.

Konteks keluarga dan lingkungan pertemanan menjadi lingkungan yang signifikan dalam membentuk preferensi politik. Dimana didalamnya terdapat interaksi dan diskusi tentang pemilihan umum seringkali mempengaruhi sudut pandang dan preferensi masing-masing individu. Pemilihan dan dukungan terhadap seorang calon atau partai politik sering kali tercermin dari pola komunikasi yang terjalin di antara anggota keluarga. Adanya kesamaan preferensi politik di antara anggota keluarga tidaklah jarang terjadi ini mungkin disebabkan oleh serangkaian faktor, termasuk nilai-nilai yang dianut, pengalaman bersama, serta dampak interaksi dan diskusi yang terjadi di lingkungan keluarga. Sehingga, pada akhirnya, hubungan di dalam keluarga dapat memengaruhi dan membentuk pilihan politik masing-masing individu.

BAB V

ANALISIS KLASIFIKASI SERTA FAKTOR PERILAKU TIDAK MEMILIH PADA MASYARAKAT KECAMATAN PURWODADI

Bab ini menyampaikan mengenai faktor yang mempengaruhi pemilih dalam berperilaku tidak memilih di Kelurahan Purwodadi. Menggunakan teori dari Restiani Fauzi dalam jurnalnya yang terdapat empat aspek faktor yang mempengaruhi adanya non-voting behavior, dimana adanya demografi, sosial, psikologis, karakteristik khusus pemilu. Adapun mengenai jenis dari non-voting behavior yang di ungkapkan oleh Eep Saiful didalam jurnal yang ditulis Bismar Arianto yang pertama golput teknis, teknis-politis, politis, dan ideologis. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam motivasi individu terkait keterlibatan dalam proses politik, yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

A. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih di Kelurahan Purwodadi

Perilaku partisipasi dalam pemilihan memiliki landasan dari beragam faktor yang kompleks yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilihan kepala daerah. Faktor-faktor ini terdiri dari dimensi demografi, aspek sosial, dinamika psikologis, serta faktor-faktor khusus yang turut memengaruhi keputusan individu terkait partisipasi dalam pemilu. Faktor-faktor tersebut membentuk landasan yang kompleks yang menjadi pemicu atau penghambat partisipasi pemilih dalam proses pemilihan kepala daerah. Dimensi demografi, aspek sosial, dinamika psikologis, dan faktor-faktor khusus merupakan elemen-elemen penting yang membentuk pola perilaku terkait pemilihan yang tercermin dari partisipasi atau ketidakhadiran pemilih dalam pemilihan kepala daerah.

1. Faktor Demografi dalam Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih Masyarakat di Kelurahan Purwodadi

Faktor demografi memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku tidak memilih dalam pemilihan umum. Aspek-aspek seperti usia, pendidikan, dan latar belakang sosio-ekonomi secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memilih. Kelompok usia muda sering kali menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam pemilu, seringkali disebabkan oleh kurangnya keterlibatan politik yang kuat atau perasaan bahwa suara mereka tidak akan membuat perbedaan signifikan dalam hasil pemilihan. Di samping itu, faktor-faktor seperti pendidikan yang rendah atau kurangnya akses terhadap

informasi politik juga dapat menjadi hambatan bagi sebagian individu dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan umum.

a) Aspek usia dalam mempengaruhi perilaku tidak memilih

Usia sendiri menjadi peran dalam sebuah pemilihan, dimana setiap warga yang sudah berumur 17 tahun sudah dapat menggunakan hak nya sebagai pemilih. Usia produktif dan non-produktif juga mempengaruhi adanya tingkat pemilihan di sebuah wilayah, Kelurahan Purwodadi sendiri memiliki jumlah usia produktif dan juga non-produktif sebanyak 16,324 jiwa. Dimana hal ini menjadikan adanya potensi mempengaruhi adanya perilaku tidak memilih di Kelurahan Purwodadi.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai faktor demografi sebagai aspek yang menyebabkan terjadinya perilaku tidak memilih di Kelurahan Purwodadi, adanya tingkat usia yang menjadi pengaruh akan kurangnya minat dalam mengikuti pemilihan kepala daerah. Usia memegang peran penting dalam perilaku tidak memilih di dalam proses pemilihan, pemilih muda sering kali cenderung enggan untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan politik karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya keterlibatan politik yang terasa relevan bagi mereka, ketidaktertarikan pada isu-isu yang disajikan oleh kandidat, atau rasa tidak puas terhadap opsi politik yang tersedia. Secara umum, pemilih muda sering kali merasa terpinggirkan dari proses politik dan merasa bahwa kepentingan serta pandangan mereka kurang diperhatikan oleh para pemimpin yang mereka pilih.

Pemilih yang lebih tua juga dapat menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam pemilihan umum karena berbagai faktor. Beberapa individu di kelompok usia yang lebih tua mungkin mengalami keterbatasan fisik atau kesehatan yang menghalangi kemampuan mereka untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Selain itu, ada juga persepsi bahwa pemilihan politik tidak lagi memiliki dampak yang signifikan bagi hidup mereka, yang mengarah pada sikap apatis terhadap proses pemilihan. Faktor-faktor ini, baik dari kelompok usia muda maupun tua, berkontribusi pada perilaku tidak memilih di tingkat demografi usia dalam konteks pemilihan umum. Dalam wawancara bersama Pak Saron, beliau menyampaikan bahwa memang ada orang tua yang tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan berbagai faktor, berikut hasil wawancara dengan Pak Saron:

“Kelompok usia dari yang saya lihat ya mas, memang dalam pemilihan itu memiliki pengaruhnya. Kadang saya lihat itu orang yang masih muda

cenderung kurang tertarik dengan urusan politik mas, karena adanya fokus mereka kedalam pekerjaan, pendidikan, ataupun aktivitas lainnya yang menjadikan mereka kurang tertarik terhadap politik” (Saron, 2023).

Dilain sisi Pak Saron juga menambahkan bahwa usia memang menjadi sesuai yang menjadi aspek dalam terjadinya golput di pemilihan, seperti yang beliau sampaikan berikut:

“Namun mas, tidak di pungkiri juga untuk usia yang lanjut mereka juga terkadang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, bukan karena tidak peduli namun faktor karena adanya penyakit bawaan usia, serta juga memang ada yang karena kekecewaan mereka terhadap sistem pemerintahan sendiri” (Saron, 2023).

Hal ini juga disampaikan oleh Mas Gunawan sebagai masyarakat yang dimana dia tidak memilih karena adanya dorongan dari teman sebaya yang saling mempengaruhi didalam lingkungan berkumpul dirinya, berikut hasil wawancara tersebut:

“Saat pemilihan itu saya enggan menggunakan hak pilih saya mas, karena adanya pandangan saya dan teman-teman saya yang sama yakni kita kurang yakin dengan apa yang kedepannya terjadi pada pemerintahan ini, karena kita liat kan cuma satu calon yang maju. Jadi saya ikut temen-temen sekalian juga karena masih adanya keraguan saya soal ikut memilih tersebut mas” (Gunawan, 2023).

Berdasarkan keterangan masyarakat diatas adanya faktor demografi yang menjadi pengaruh terhadap tingkat partisipasi perilaku tidak memilih dalam Kelurahan Purwodadi dalam aspek usia di masyarakat memiliki keterikatan, sebab masyarakat yang memiliki usia lebih muda cenderung lebih memikirkan mengenai pekerjaan, pendidikan, ataupun aktivitas yang mereka lakukan. Sedangkan, kelompok dengan usia lanjut atau yang lebih tua memiliki sebab dikarenakan memiliki penyakit bawaan usia seperti adanya penyakit berhubungan penglihatan ataupun fisik yang sudah renta, serta dilain sisi juga terdapat mereka yang kecewa dengan sistem demokrasi tentunya.

Dalam hal ini juga dapat dilihat dimana usia antara 20-49 tahun di Kelurahan Purwodadi memiliki jumlah penduduk terbanyak yang jika dijumlah 10.076 jiwa. Selain itu mereka yang sudah berusia lanjut juga memegang penting dalam tindakan perilaku tidak memilih, hal ini didasari dari adanya usia pemilih antara 50-75 keatas yang dimana adanya kerentanan terhadap penyakit dan memiliki penyakit

bawaan, dengan jumlah usia yang telah lanjut yaitu 6.248 jiwa. Hal tersebut nyatanya memang menjadi pengaruh dimana adanya keterikatan usia dalam menentukan perilaku tidak memilih tersebut.

b) Aspek pekerjaan dalam mempengaruhi perilaku tidak memilih

Wilayah Kabupaten Grobogan sendiri memilih aspek pekerjaan terbanyak pada bidang pertanian, yang disusul dengan karyawan swasta sebagai peringkat kedua, dan disusul berdagang sebagai pekerjaan yang terdapat di Kabupaten Grobogan. Sektor pertanian memiliki 332.631 individu yang bekerja sebagai petani, serta dalam urutan kedua karyawan swasta memiliki jumlah 142.405 individu, dan terakhir penyumbang terbesar dalam pekerjaan adalah berdagang yang memiliki 19.500 individu (Grobogan D. K., 2023). Adanya masyarakat yang memiliki sektor pekerjaan sebagai karyawan swasta memiliki kemungkinan yang dapat menjadikan seorang pemilih untuk tidak menggunakan hak nya sebagai pemilih, dimana hal ini menjadi pengaruh di Kelurahan Purwodadi dimana adanya unsur pekerjaan sebagai pengaruh adanya perilaku tidak memilih.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Mas Dian juga dirinya menyampaikan bahwa dirinya tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan pekerjaan, dimana dirinya sedang bekerja diluar daerah pemilihan, berikut hasil wawancara dengan Mas Dian:

“Saya pribadi saat itu tidak memilih karena terdapat kendala mas, saya sedang bekerja diluar daerah. Sedangkan saat itu adanya pilkada dan juga Covid-19, jadi saya bingung juga mengenai bagaimana cara pemilihan diluar daerah mas” (Dian, 2023).

Hal ini didukung dengan penjelasan yang dilakukan Pak Saroni sebagai Ketua PPS di Kelurahan Purwodadi, berikut hasil wawancara tersebut:

“Menurut saya, memang ada hal tersebut dimana masyarakat sebagai pemilih pada Pilkada 2020 tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan pekerjaan diluar daerah, sebab mereka terkendala dengan kurangnya pengertian mengenai bagaimana cara pemilihan ataupun tempat pemilihan yang bisa mereka datangi mas, walaupun kita dari pihak KPU sudah mensosialisasikan mengenai tata cara pemilihan tersebut ya mas, kemungkinan informasi tersebut memang ada yang tidak sampai kepada masyarakat” (Saroni, 2023).

Pak Saroni menambahkan dalam wawancara mengenai adanya alasan pekerjaan sebagai aspek yang menjadikan pemilih untuk tidak menggunakan hak

pilihnya karena alasan waktu yang sangat padat bagi mereka yang bekerja diluar daerah, berikut hasil wawancara tersebut:

“Menurut saya yang saya lihat ya mas, orang yang bekerja di PT itu memiliki jam kerja yang padat dan memiliki shift masing-masing, seperti tetangga saya yang bekerja dengan sistem shift dirinya lebih memilih istirahat mas. Walaupun konteks disini dia tidak melakukan golput saat itu, tapi hal ini menjadikan pandangan kenapa orang yang bekerja bisa memilih untuk golput mas mungkin seperti itu ya” (Sarono, 2023).

Hal ini juga diperkuat dengan adanya hasil wawancara dengan Mas Arifin sebagai masyarakat Kelurahan Purwodadi yang bekerja diluar daerah, dimana dirinya memang sulit untuk mendapatkan akses mengenai adanya pemilihan kepala daerah diluar negeri, berikut hasil wawancara tersebut:

“Saya bekerja di luar negeri mas, tepatnya di Jepang. Meskipun saya sangat ingin memberikan suara saya untuk memilih pemimpin daerah, namun karena keterbatasan waktu dan jarak, saya tidak bisa pulang untuk ikut dalam proses pemilihan. Saya yang bekerja di luar negeri merasakan dilema antara kewajiban pekerjaan dan partisipasi dalam proses demokrasi. Terkadang pula mas, sulit untuk mengakses informasi terkait prosedur pemilihan atau melakukan pemungutan suara di luar negeri” (Arifin, 2023).

Dari penjelasan diatas mengenai faktor demografi dalam aspek pekerjaan sebagai alasan bagi masyarakat di Kelurahan Purwodadi tidak menggunakan hak pilihnya, memang kecenderungan seseorang memiliki sebuah aktivitas yang lebih dipentingkan terlebih dahulu dalam urusannya, bukan karena tidak penting antara satu dan yang lainnya namun memprioritaskan yang menurut mereka pribadi benar. Adanya pengaruh ini juga menyebabkan masyarakat sulit untuk menggunakan hak pilihnya dalam bagian dari demokrasi, sebab kewajiban warga negara yang seharusnya terlaksana dengan baik namun memiliki kendala karena adanya pekerjaan yang dilakukan.

Dari teori mengenai perilaku tidak memilih masyarakat didalam artikel yang ditulis oleh Restiani (2013), faktor demografi memang tidak dapat dilepaskan dalam perilaku masyarakat (Fauzie, 2013). Faktor demografi memiliki banyak aspek yang dapat menjadi penyebab seorang pemilih untuk tidak memilih. Seperti yang ditemukan di Kelurahan Purwodadi, adanya aspek mengenai unsur usia dan pekerjaan yang menjadi aspek paling berpengaruh dalam faktor demografi sendiri di Kelurahan Purwodadi. Dilain sisi tiga aspek lainnya bukan tidak ada dalam

masyarakat Kelurahan Purwodadi, namun aspek tersebut kemungkinan tetap ada dikarenakan adanya sebuah pendidikan yang menjadikan seseorang menjadi bisa lebih berfikir kritis dan menyikapi setiap apa yang mereka lakukan. Selain itu adanya aspek gender yang menjadikan perbedaan juga dapat mempengaruhi dari partisipasi politik seseorang, walaupun notabene hal tersebut kecil kemungkinan dapat terjadi dalam masyarakat Kelurahan Purwodadi yang dimana saat peneliti lihat tidak adanya ketimpangan gender antar masyarakat. Dan juga untuk aspek tempat tinggal yang berkaitan dengan faktor demografi hal ini kemungkinan besar tidak terjadi, sebab kelurahan purwodadi merupakan tempat yang maju ketimbang dengan kelurahan atau desa lainnya di wilayah Kabupaten Grobogan, serta dimana dilihat pemukiman para penduduk masyarakat Kelurahan Purwodadi sudah memiliki pemukiman yang bisa dibilaang layak dengan adanya berbagai transportasi dan jalur penghubung untuk berbagai kendaraan yang ada, walaupun hal ini mungkin saja terjadi karena adanya faktor tempat tinggal yang jauh dari tempat pemilihan.

2. Faktor Sosial dalam Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih Masyarakat di Kelurahan Purwodadi

Aspek-aspek sosial memainkan peran yang esensial dalam perilaku ketidakhadiran dalam pemilihan umum atau yang dikenal sebagai golongan putih (golput). Manusia, sebagai makhluk sosial, secara inheren terikat oleh dinamika interaksi sosial yang memengaruhi pilihan mereka. Berbagai faktor sosial, termasuk lingkungan, status pernikahan, partisipasi dalam organisasi, serta tingkat solidaritas kelompok, semuanya turut berkontribusi pada fenomena golput. Selain itu, persepsi individu terhadap kewajiban sebagai warga negara juga menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku politik mereka.

a) Lingkungan dalam mempengaruhi perilaku tidak memilih

Lingkungan seseorang memiliki peran yang signifikan dalam keputusan untuk golput, di mana aspek-aspek seperti kondisi ekonomi, budaya politik lokal, dan akses terhadap informasi politik dapat berpengaruh. Demikian juga, individu yang baru menikah mungkin mengalami pergeseran prioritas dan fokusnya, yang dapat memengaruhi minatnya dalam urusan politik. Selain itu adanya keterlibatan dalam organisasi sosial atau politik dapat memengaruhi kesadaran politik seseorang dan akhirnya mempengaruhi individu tersebut dapat melakukan tindakan golput. Solidaritas dari keluarga atau komunitas juga memainkan peran

penting, di mana tekanan atau norma-norma yang berkembang dalam kelompok tersebut dapat memengaruhi keputusan individu dalam menggunakan hak pilihnya. Terakhir, persepsi mengenai kewajiban sebagai warga negara, yang mencakup pemahaman akan tanggung jawab untuk terlibat dalam proses politik, turut mempengaruhi perilaku golput seseorang. Faktor-faktor sosial ini memberikan gambaran tentang bagaimana konteks sosial dapat membentuk atau memengaruhi keputusan politik individu dalam partisipasinya.

Pak Saroni selaku ketua PPS di Kelurahan Purwodadi, beliau memang selalu menyinggung mengenai adanya pandemi Covid-19 sebagai permasalahan utama dalam terjadinya tingkat golput di Kelurahan Purwodadi yang meningkat saat pemilihan kepala daerah tahun 2020. Banyaknya masyarakat yang merasa takut atau cemas akibat banyaknya korban akibat dari pandemi Covid-19. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Pak Saroni mengenai pandemi Covid-19:

“Faktor utama tadi yang saya bicarakan di depan, penyebab terbesar memang waktu pandemi Covid-19, terutama karena adanya rasa takut masyarakat akan terjangkit corona ketika dia ke tempat TPS dengan aturan peraturan dari sesuai Dinkes kan terlalu ketat juga masyarakat menjadi enggan untuk mengikuti pemilihan” (Saroni, 2023).

Dalam hasil wawancara dengan Mbak Anisa, dirinya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 saat itu, serta dirinya mengalami gejala karena virus tersebut yang menjadikan dirinya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Mbak Anisa:

“Saya pribadi waktu itu mengalami gangguan kesehatan pernafasan ya mas, seperti adanya sakit tenggorokan dan juga hilangnya indra penciuman saya selama beberapa hari. Hal itu menjadikan ketakutan bagi saya pribadi untuk menghadiri pemilihan, karena takut nantinya dapat menularkan virus corona terhadap masyarakat lainnya, terutama para orang tua yang lanjut usia, dan juga orang-orang yang sistem imunnya sedang tidak bagus bisa saja kan mas, karena saya tau petugas TPS itu menjalankan tugasnya sampai malam bisa mas, takutnya saat lagi drop malah dia bisa tertular gara-gara saya mas” (Anisa, 2023).

Dalam sesi wawancara peneliti dengan Mbak Anisa, dirinya juga menyampaikan bahwa memang banyak juga teman-temannya mengalami gejala yang sama dan adapula yang hanya mengalami gejala ringan saja, berikut hasil wawancara tersebut:

“Ditambah mas banyak juga masyarakat yang memang mengalami gejala ringan saat itu, teman saya juga merasakan hal yang jauh lebih parah dari saya, dirinya tidak bisa mencium bau selama hampir satu bulan lamanya. Dilain sisi mas, tentunya akan kasus corona ini yang kian meningkat, namun terkadang kesadaran beberapa masyarakat itu minim sebab masih adanya yang tidak mengikuti aturan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona ini” (Anisa, 2023).

Dari hasil wawancara dengan Mas Dian, dirinya juga memberikan pendapatnya tentang adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah saat masa pandemi, berikut hasil wawancara tersebut:

“Dari yang saya rasakan memang ya mas saat pilkada itu terjadi corona, sehingga hal itu mengubah cara orang untuk berinteraksi dan beraktivitas sehari-harinya. Orang tua saya dirumah pun menjalani *social distancing* untuk menghindari paparan virus corona mas, menurut saya sih memang ya corona lagi naik-naiknya saat itu Kabupaten Grobogan sendiri kasus sudah seribu saat itu kalo gk salah ya mas, jadi kan kita was-was juga sama orang tua dirumah dan saudara kita” (Dian, 2023).

Hal ini juga dikonfirmasi dengan adanya hal senada yang dalam wawancara bersama Pak Arba, dia menjelaskan bahwa dirinya sedang terkena virus corona pada saat itu yang menjadikan dia untuk tidak memilih saat Pilkada 2020 berlangsung, berikut hasil wawancara tersebut:

“Keadaan sih mas yang buat saya tidak memilih, saya waktu itu terkena covid 2 kali mas, sampai pernah di isolasi sendirian mas. Keluarga saya juga ada yang kena waktu itu, kakak saya terkena juga akhirnya saya tidak dapat menggunakan hak pilih saya mas” (Arba, 2023).

Dilain sisi adanya covid-19 membuat Ibu Deyani sebagai warga Kelurahan Purwodadi merasa cemas akan kesehatan dirinya dan Keluarganya, berikut hasil wawancara tersebut:

“Virus corona itu kan gampang menyebar ya mas ke kita lewat udara, saya takut kalo seumpama saya yang terkena saat itu, nantinya keluarga saya kena imbasnya mas. Karena kita tau sendiri di TPS itu kadang rame banget saat pemilihan kan mas” (Deyani, 2023).

Perilaku ketidakikutsertaan dalam pemilihan di masyarakat Kelurahan Purwodadi memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor sosial, khususnya dalam konteks pandemi Covid-19. Situasi lingkungan yang sedang menghadapi dampak pandemi ini menjadi salah satu pemicu utama mengapa sebagian masyarakat

enggan untuk turut serta dalam proses pemilihan. Kondisi ini terjadi karena adanya kekhawatiran dan ketakutan terhadap penyebaran virus corona di Kelurahan Purwodadi, yang menyebabkan sebagian besar individu merasa ragu dan enggan untuk memberikan partisipasi dalam proses pemilihan. Ketakutan akan risiko penularan virus serta kekhawatiran akan kesehatan diri dan orang-orang terdekat menjadi alasan utama mengapa sebagian besar individu di kelurahan tersebut memilih untuk tidak memberikan suara mereka. Hal ini mengilustrasikan bagaimana situasi lingkungan, khususnya dalam konteks pandemi, dapat secara signifikan mempengaruhi partisipasi politik suatu komunitas.

b) Solidaritas Kelompok mempengaruhi perilaku tidak memilih

Terkait dengan partisipasi dalam pemilihan, hubungan emosional atau keterikatan yang kuat terhadap kelompok sosial dapat menjadi faktor yang signifikan. Ketika individu merasa erat terikat dengan identitas kelompoknya berdasarkan berbagai faktor seperti ras, status ekonomi, jenis kelamin, atau usia, hal ini sering menghasilkan kesadaran kelompok yang mendorong partisipasi dalam pemilihan. Orang-orang yang memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap kelompoknya cenderung lebih termotivasi untuk terlibat dalam pemilihan karena peduli dengan isu-isu yang mempengaruhi kelompok mereka secara keseluruhan. Keterikatan yang kuat ini juga dapat meningkatkan pengetahuan atau keterampilan mereka, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dalam proses pemilihan.

Dalam hal ini telah mewawancarai Mas Gunawan sebagai masyarakat dari Kelurahan Purwodadi, berikut hasil wawancara tersebut:

“Memang mas, saya waktu itu memilih berdasarkan dengan teman-teman yang saya pilih, dilain sisi kita memilih golput karena ya adanya sikap kurang percaya terhadap kepemilih saat itu, dimana hanya satu calon saat itu yang mencalonkan diri, dan juga dari yang kita lihat mas banyaknya jalan antar daerah yang kurang mendapat penanganan yang membuat teman saya terjatuh saat itu” (Gunawan, 2023).

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa saat pemilihan kepala daerah terjadi dengan adanya hanya satu calon atau opsi kotak kosong sebagai pilihan. Di sisi lain, rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahan menjadi penyebab utama, terutama karena kurangnya fasilitas publik yang layak seperti infrastruktur jalan yang merupakan penghubung antar daerah. Ini

menggambarkan keterkaitan antara ketiadaan opsi dalam pemilihan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.

3. Faktor Psikologis dalam Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih Masyarakat di Kelurahan Purwodadi

Faktor-faktor psikologis memainkan peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, membentuk landasan yang kompleks dan saling terkait. Salah satu aspek utama adalah kepercayaan politik, yang bisa saja rendah karena pengalaman negatif sebelumnya atau ketidakpercayaan pada pemimpin politik, membuat individu merasa bahwa suaranya tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Efikasi politik yang rendah juga menjadi faktor penting, di mana individu merasa putus asa atau merasa keterlibatan politiknya tidak memiliki arti. Ketertarikan politik yang minim juga dapat menjadi hambatan, baik karena kurangnya minat pada isu-isu politik yang relevan atau kurangnya akses terhadap informasi yang memadai. Selain itu, kepuasan terhadap institusi politik, seperti lembaga pemerintah, juga memiliki pengaruh signifikan, kekecewaan terhadap kinerja institusi dapat mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik (Fauzie, 2013).

Selain faktor-faktor tersebut, ada elemen-elemen psikologis lainnya yang memainkan peran, kebiasaan memilih atau tidak memilih juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, orang yang kurang terbiasa atau tidak familiar dengan proses pemilihan cenderung enggan untuk berpartisipasi. Kesabaran dalam politik juga menjadi hal yang penting, harapan akan perubahan yang cepat atau kecewa karena perubahan yang lambat dapat mengurangi motivasi untuk terlibat dalam proses politik. Begitu juga dengan altruisme, semangat untuk berkontribusi pada kebaikan bersama, yang dapat mendorong partisipasi politik namun dapat terkikis jika tidak terasah dengan baik. Yang terakhir mengenai kepuasan individu yang tidak terpenuhi juga dapat menghalangi keterlibatan politik, karena individu cenderung memprioritaskan kebutuhan pribadi mereka daripada berpartisipasi dalam urusan politik yang dianggap jauh dari kepentingan langsung mereka. Semua faktor ini terkait secara kompleks dan saling memengaruhi, menciptakan tantangan bagi partisipasi politik yang aktif dari masyarakat (Fauzie, 2013).

Kepercayaan Serta Ketidakpuasan Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih

Menurut Paige (1991), faktor penentu tingkat keterlibatan politik seseorang adalah kesadaran politik serta keyakinan terhadap pemerintah atau sistem politik. Kepercayaan politik adalah evaluasi normatif masyarakat terhadap

sistem politik atau elemennya yang didasarkan pada harapan (Hetherington, 1998). Menurut Miller dan Listhaug (1990), kepercayaan politik menjadi inti dari teori demokrasi, merujuk pada penilaian apakah kekuasaan politik dan lembaga-lembaga yang menjalankannya sesuai dengan harapan normatif yang dipegang oleh masyarakat (Akhrani, Imansari, & Faizah, 2018).

Dalam hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Kelurahan Purwodadi yaitu Mbak Anisa, dia menginformasikan mengenai kurangnya kepercayaan dirinya mengenai perpolitik yang ada di Indonesia, berikut hasil wawancara tersebut:

“Dari saya pribadi ya mas, saya kurang percaya terhadap pemerintahan sebab saat ini banyak kasus korupsi yang banyak sekali dilakukan dalam pemerintahan kan, dan juga mas saya rasa keterbukaan informasi itu masih sangat minim bagi saya antara pemerintah dan juga masyarakat terutama, sedangkan kita juga ingin mengetahui hal yang sifatnya data atau informasi yang pasti dalam pembangunan di pemerintahan kan mas” (Anisa, 2023).

Dilain sisi Mas Dian juga memberikan informasi mengenai adanya ketidakpercayaan masyarakat pada pasangan calon yang ada, berikut hasil wawancara tersebut:

“Pandangan saya mengenai golput itu ya mas, masyarakat itu ada yang tidak percaya kepada para calon dikarenakan janji-janji yang tidak terpenuhi ketika menjabat, dimana ketidakkonsistenan dalam kebijakan yang diambil setelah dipilih sebagai pejabat, yang menjadikan bahwa pemimpin yang merak pilih tidak berkomitmen dengan apa yang mereka sampaikan saat kampanye dulu” (Dian, 2023).

Dengan demikian adanya kepercayaan yang minim terhadap para calon dapat menyebabkan masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya. Ketidakpuasan ini timbul dari perasaan bahwa para calon telah mengecewakan dengan tidak memenuhi janji-janji yang mereka berikan kepada publik. Masyarakat seringkali merasa kecewa karena janji-janji yang diutarakan oleh calon pemimpin tidak terealisasi, sehingga kepercayaan mereka pada calon menjadi rendah. Rendahnya kepercayaan ini menjadi faktor utama yang membuat sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.

4. Faktor Karakteristik Khusus Pemilu dalam Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih Masyarakat di Kelurahan Purwodadi

Perilaku tidak memilih dalam pemilihan umum seringkali terkait dengan beragam faktor karakteristik yang mempengaruhi proses pemilihan. Salah satunya adalah kekuatan calon pemilih dalam memahami dan menilai kualitas serta integritas calon yang ditawarkan. Ketika masyarakat tidak yakin atau kehilangan kepercayaan terhadap para kandidat, hal ini dapat mengarah pada penurunan partisipasi dalam pemungutan suara. Kesamaan preferensi kebijakan juga memainkan peran penting, jika masyarakat merasa bahwa opsi yang tersedia tidak mencerminkan nilai atau kebutuhan mereka, mereka mungkin enggan untuk memilih. Selain itu, praktik iklan negatif yang sering mewarnai kampanye politik dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Kampanye yang lebih berfokus pada menjelekkan lawan ketimbang mempromosikan keunggulan kandidat sendiri dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan pemilih, membingungkan opsi yang ada, dan pada akhirnya, mengurangi minat untuk memberikan suara. Pengaruh dari kampanye politik itu sendiri juga menjadi pertimbangan utama, jika pemilih merasa bahwa pesan yang disampaikan tidak relevan atau tidak memengaruhi kehidupan mereka, mereka mungkin cenderung untuk tidak memilih (Fauzie, 2013).

Dalam konteks pemilihan yang diwajibkan, meskipun beberapa negara menerapkan kewajiban untuk memberikan suara, hal ini tidak selalu menjamin bahwa partisipasi akan meningkat. Pada kasus tertentu, wajib memilih justru dapat menciptakan reaksi negatif di kalangan pemilih yang merasa terpaksa untuk memberikan suara, tanpa kesadaran penuh terhadap calon yang ada. Faktor disproportional dalam representasi politik juga dapat memengaruhi keputusan untuk tidak memilih. Ketidakcocokan antara hasil pemilihan dengan preferensi pemilih dapat menghasilkan rasa frustrasi dan keputusasaan terhadap sistem politik yang ada. Terakhir, kedewasaan demokrasi dalam suatu negara dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Jika masyarakat merasa bahwa sistem politik tidak memberikan ruang yang cukup untuk suara mereka didengar atau bahwa demokrasi itu sendiri tidak efektif, maka hal ini bisa menjadi alasan bagi mereka untuk tidak melibatkan diri dalam proses pemilihan (Fauzie, 2013).

Preferensi Kebijakan Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih

Kesamaan dalam preferensi kebijakan antara kandidat yang bersaing memainkan peran penting dalam keputusan para pemilih. Apabila calon memiliki pandangan kebijakan yang serupa, kecenderungan masyarakat untuk memilihnya cenderung meningkat karena persepsi akan perbedaan hasil yang tidak signifikan dalam manfaat yang diperoleh dari keduanya. Sebaliknya, bila terdapat perbedaan kebijakan yang mencolok antara calon, hal tersebut bisa menyebabkan masyarakat menolak untuk menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk penolakan terhadap perbedaan kebijakan tersebut. Kecerupaan atau ketidaksamaan dalam preferensi kebijakan antara kandidat memiliki pengaruh besar terhadap respons pemilih. Kandidat yang memiliki pandangan kebijakan yang serupa seringkali mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat karena persepsi akan kesamaan keuntungan yang diperoleh dari keduanya yang dianggap tidak signifikan. Di sisi lain, jika terdapat perbedaan kebijakan yang mencolok antara calon, hal tersebut mungkin menyebabkan masyarakat menolak untuk menggunakan hak pilihnya sebagai respons terhadap perbedaan tersebut.

Pada hasil wawancara dengan Pak Saroni mengenai adanya preferensi terhadap kampanye atau janji-janji yang dilakukan oleh calon dapat menjadi penyebab dalam perilaku tidak memilih di masyarakat Kelurahan Purwodadi, berikut hasil wawancara tersebut:

“Sebagian besar dari masyarakat pasti akan melihat kebijakan apa yang akan dibuat oleh calon pemimpin, masyarakat yang memilih untuk golput juga melakukannya bukan karena mereka tidak peduli dengan proses demokrasi. Sebaliknya, keputusan tersebut berkaitan dengan kebijakan yang diprioritaskan oleh para kandidat yang bertarung. Masyarakat merasa bahwa program-program yang diusung tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan serta aspirasinya sebagai bagian dari masyarakat” (Saroni, 2023)

Hal ini serupa dengan pandangan dari Mas Rizal mengenai adanya kesamaan dalam preferensi kebijakan yang dijanjikan oleh para calon pemimpin, berikut hasil wawancara tersebut:

“Kesamaan pandangan mengenai harapan-harapan yang dijanjikan dalam kampanye memang dapat menjadikan pemilih cenderung memilih calon tersebut mas, namun dilain sisi adanya rasa ketidakcocokan harapan yang diberikan kepada pemilih juga dapat menjadikan masyarakat memilih untuk melakukan golput” (Rizal, 2023).

Dalam sebuah pemilihan, keberadaan preferensi kebijakan antara calon pemimpin dan masyarakat dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pemilihan. Namun, terdapat pandangan yang berbeda antara calon pemimpin dan masyarakat yang kadang-kadang dapat menyebabkan sebagian pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Perbedaan preferensi kebijakan di antara calon pemimpin dan masyarakat bisa menjadi alasan bagi sebagian pemilih untuk tidak mengikuti proses pemilihan. Meskipun adanya kesempatan untuk turut serta dalam pemilihan, namun perbedaan pandangan tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi beberapa individu untuk tidak menggunakan hak suara mereka.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap tingkat golongan putih (golput) di Kelurahan Purwodadi adalah faktor sosial. Aspek lingkungan sosial memiliki dampak yang paling signifikan di antara faktor-faktor lainnya. Situasi lingkungan yang menciptakan ketidakpartisipasian masyarakat atau perilaku golput disebabkan oleh keberadaan pandemi Covid-19 yang menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan di kalangan masyarakat. Adanya pandemi ini mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak turut serta dalam pemilihan karena merasa cemas dan khawatir akan kondisi yang tidak pasti akibat pandemi. Hal ini menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan sosial yang tak terduga seperti pandemi dapat memengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan di Kelurahan Purwodadi.

B. Ragam Perilaku Golput di Kelurahan Purwodadi

Golongan putih (golput) merupakan gerakan protes dari mahasiswa dan pemuda yang menentang sistem politik dengan simbol aksi pencoblosan kertas putih pada surat suara serta kampanye untuk tidak ikut pemilu. Gerakan ini berawal sebagai protes terhadap penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1971 yang hanya diikuti oleh 10 partai, turun drastis dari 172 partai pada pemilu 1955. Dimulai pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta oleh Arief Budiman, gerakan ini bukan untuk memenangkan pemilu tapi untuk menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah serta menuntut kebebasan berpandangan yang berbeda dengan pemerintah yang saat itu sangat membatasi ruang gerak masyarakat. Meski pemilu itu secara administratif terlihat demokratis, pada praktiknya justru melanggar prinsip demokrasi dengan pemilihan yang lebih terkesan sebagai mobilisasi daripada partisipasi masyarakat. Golput mencapai 6,67% pada pemilihan umum 1971 meski perlawanan dari mahasiswa dan pemuda belum mencapai titik maksimal (Tele, 2022).

Masyarakat yang tidak memilih dalam suatu pemilihan seringkali memiliki beragam alasan yang mendasarinya, salah satunya adalah perasaan ketidakpuasan atau kepuasan terhadap pilihan yang ada. Beberapa individu mungkin merasa bahwa calon yang ditawarkan tidak mencerminkan nilai atau aspirasi yang mereka yakini. Mereka mungkin kecewa dengan sistem politik yang terasa tidak mampu mewakili kepentingan mereka atau merasa bahwa partisipasi dalam pemilihan tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Selain itu, ada juga yang merasa puas dengan keadaan saat ini dan tidak melihat perlunya mengubahnya melalui partisipasi dalam proses pemilihan. Namun demikian, tidak memilih juga dapat membawa konsekuensi, karena pengabaian terhadap hak pilih dapat mengurangi representasi suara dalam demokrasi dan mengurangi keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan politik yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Mendorong kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan memahami bahwa perubahan dapat dimulai dari keterlibatan aktif dalam pemilihan adalah hal yang penting bagi kemajuan masyarakat secara kolektif. Hal ini juga yang menjadikan klasifikasi bagi para perilaku tidak memilih kedalam empat golongan menurut Arianto (2011), yang pertama golput teknis, kedua golput teknis-politis, ketiga golput politis, dan terakhir golput ideologis.

1. Golput teknis yang terjadi di Kelurahan Purwodadi

Golput teknis merujuk pada individu yang menghadapi kendala dalam berpartisipasi dalam proses pemilihan umum karena alasan-alasan spesifik. Beberapa di antaranya mungkin tidak dapat hadir di lokasi pemungutan suara karena situasi yang tak terduga seperti kematian anggota keluarga, kelelahan yang berlebihan yang menyebabkan tertidur, atau alasan lain yang berhubungan dengan keadaan darurat yang tidak dapat diantisipasi, adapun juga dimana sejumlah pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang disebabkan oleh masalah administratif, seperti kelalaian atau ketidakrekanan dalam proses administrasi pemilihan. Situasi ini menggambarkan bagaimana sejumlah individu tidak terhitung sebagai pemilih yang sah karena kesalahan atau ketidaksesuaian dalam prosedur administratif yang berlaku. Seiring dengan itu, terdapat kelompok lain yang melakukan kesalahan dalam melakukan pencoblosan sehingga suara yang mereka berikan dianggap tidak sah oleh petugas penyelenggara pemilu. Golput teknis melibatkan individu yang mengalami kesulitan untuk mengikuti proses pemilihan karena berbagai alasan teknis yang spesifik. Beberapa dari mereka mungkin tidak bisa hadir di lokasi pemungutan suara karena keadaan darurat seperti kematian anggota keluarga, kelelahan berlebihan yang menyebabkan tertidur, atau keadaan tak terduga lainnya. Di samping itu, ada juga kelompok yang melakukan

kesalahan saat mencoblos sehingga suara yang mereka berikan dianggap tidak sah oleh pihak yang mengatur pemilu (Arianto, 2011).

Masyarakat di Kelurahan Purwodadi yang termasuk dalam golput teknis memiliki banyak alasan dalam ketidakikutan mereka dalam pelaksanaan pemilu. Dimana dalam hal ini masyarakat cenderung enggan menggunakan hak pilihnya karena terdapat pandemi Covid-19 pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pak Saron, dirinya memberikan informasi sebagai berikut:

“Memang benar banyak warga yang memilih untuk golput, saya sangat menyadari pentingnya hak suara dalam menentukan masa depan daerah. Namun dilain sisi situasi pandemi Covid-19 pada saat itu membuat masyarakat khawatir akan kesehatan mereka. Para orang tua yang memiliki kerentanan terhadap virus ini dan pergi untuk ke tempat pemungutan suara bisa menjadi risiko yang dapat terjadi” (Saron, 2023).

Beliau menambahkan bahwa terdapat masyarakat yang rentan terkena Covid-19, dimana mereka memiliki penyakit bawaan usia, berikut hasil wawancara tersebut:

“Memang mas dari yang saya lihat masyarakat itu memiliki orang tua yang rentan akan terkena Covid-19, ada yang memiliki penyakit bawaan seperti asma, diabetes atau penyakit bawaan lainnya. Dan saya rasa mereka berfikir untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena saat itu terjadi pandemikan, jadinya mereka melakukan golput karena hal itu mas” (Saron, 2023).

Hal tersebut juga diperkuat dengan wawancara dengan Mas Rizal, beliau menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 menjadi sesuatu hal beresiko terhadap kesehatan keluarganya, berikut hasil wawancara tersebut:

“Saat itu situasi pandemi mas, saya mempertimbangkan akan diri saya dan keluarga karena khawatir akan risiko terkena Covid-19 saat itu. Jumlah kasus tiap hari meningkat soalnya mas disini, saya merasa risiko pergi ke tempat pemungutan suara lebih besar dibanding manfaat dari hak pilih saya sendiri, saya sayang keluarga saya mas” (Rizal, 2023).

Mbak Anisa juga memberikan informasi yang sama mengenai dirinya yang tidak menggunakan hak pilihnya, dimana dirinya sedang terkena virus corona yang menjadikan dirinya untuk tidak dapat memilih, berikut wawancara dengan Mbak Anisa:

“Saya pribadi waktu itu mengalami gangguan kesehatan pernafasan ya mas, seperti adanya sakit tenggorokan dan juga hilangnya indra penciuman saya selama beberapa hari. Hal itu menjadikan ketakutan bagi

saya pribadi untuk menghadiri pemilihan, karena takut nantinya dapat menularkan virus corona terhadap masyarakat lainnya, terutama para orang tua yang lanjut usia, dan juga orang-orang yang sistem imunnya sedang tidak bagus bisa saja kan mas, karena saya tau petugas TPS itu menjalankan tugasnya sampai malam bisa mas, takutnya saat lagi drop malah dia bisa tertular gara-gara saya mas” (Anisa, 2023).

Dilain sisi pula Pak Arba sebagai masyarakat menegaskan adanya pandemi sangat mempengaruhi dirinya dalam melakukan pemilihan, dimana dirinya terkena virus corona sebanyak dua kali dalam beberapa waktu dikarenakan pekerjaannya yang harus bertemu dengan banyak orang, berikut hasil wawancara tersebut:

“Saya mau gimana lagi mas, pekerjaan saya mengharuskan saya bertemu dengan orang asing saat itu jadi saya rentan terpapar virus corona, dan memang akhirnya saya dinyatakan positif saat itu mas” (Arba, 2023).

Hal ini diperkuat dengan berbagai informasi dari para narasumber yang menjadikan pandemi ini sebagai alasan yang utama bagi mereka dalam perilaku tidak memilih, dimana adanya kecemasan yang berlebih terhadap pandemi Covid-19. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Deyani sebagai masyarakat Kelurahan Purwodadi:

“Saya bukan tidak mau menggunakan hak saya sebagai pemilih ya mas, disini saya memiliki kecemasan terhadap adanya corona ini, dimana saya memilih untuk berdiam diri dirumah ketika adanya Pilkada, sebab banyaknya masyarakat yang terpapar akibat Covid-19 ini kan mas” (Deyani, 2023).

Berdasarkan informasi yang diungkapkan dalam sesi wawancara peneliti dengan para masyarakat, banyak dari mereka menyoroti adanya perilaku ketidakpartisipatif dalam proses pemilihan yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang signifikan di kalangan masyarakat Kelurahan Purwodadi. Terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi individu yang memiliki anggota keluarga lanjut usia yang rentan terhadap infeksi virus corona. Kekhawatiran semakin meningkat bagi individu yang menderita penyakit bawaan, seperti asma atau tekanan darah tinggi, karena mereka juga termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap dampak serius dari virus tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan utama di balik perilaku tidak memilih yang diamati dalam masyarakat, dimana kesadaran akan risiko yang dihadapi oleh kelompok rentan menjadi faktor penentu dalam ketidakpartisipasian mereka dalam proses pemilihan.

Hal ini merupakan keadaan darurat yang membuat masyarakat merasa takut untuk datang ke tempat pemungutan suara, hal tersebut juga dikonfirmasi dengan

adanya peraturan yang ketat dimana masyarakat merasa malas untuk melakukan protokol kesehatan saat adanya pemilihan kepala daerah di Kelurahan Purwodadi. Penyebab ini menjadikan para pemilih yang seharusnya dapat menggunakan hak pilihnya menjadi tidak dapat menggunakan hak nya sebagai pemilih, berdasarkan pada klasifikasi perilaku tidak memilih, pemilih ini termasuk di dalam golput teknis.

Para pemilih di Kelurahan Purwodadi memang memiliki banyak sekali aspek dalam perilaku tidak memilih, seperti adanya pemilih yang merasa bingung dengan tatacara pemilihan diluar daerah. Didalam wawancara bersama Mas Dian dirinya menyampaikan bahwa dirinya minim didalam mendapatkan informasi mengenai pemilihan di luar daerah, berikut hasil wawancara peneliti dengan Mas Dian:

“Saya pribadi saat itu tidak memilih karena terdapat kendala mas, saya sedang bekerja diluar daerah. Sedangkan saat itu adanya pilkada dan juga Covid-19, jadi saya bingung juga mengenai bagaimana cara pemilihan diluar daerah mas” (Dian, 2023).

Dalam sesi wawancara bersama Mas Dian, ia mengungkapkan kebingungannya terkait proses pemilihan di luar daerah yang dipicu oleh minimnya informasi bagi para pemilih. Mas Dian menyatakan ketidaktahuannya mengenai prosedur administratif yang harus diikuti saat mendaftarkan diri sebagai pemilih ketika berada di luar daerah. Beliau kesulitan dalam memahami tata cara administratif yang berlaku saat hendak menjadi pemilih di tempat yang bukan daerah asalnya. Hal ini menandakan perlunya penyediaan informasi yang lebih jelas dan akses yang mudah bagi warga yang berada di luar daerah agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan dengan lebih mudah dan efektif.

Dalam sesi wawancara bersama Mas Arifin, dirinya juga menjelaskan mengenai dirinya yang golput karena alasan pekerjaan diluar negeri, hal ini membuat dirinya golput pada saat Pilkada 2020 karena terbatas waktu dan jarak, serta kurangnya informasi mengenai pemilihan. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Saya bekerja di luar negeri mas, tepatnya di Jepang. Meskipun saya sangat ingin memberikan suara saya untuk memilih pemimpin daerah, namun karena keterbatasan waktu dan jarak, saya tidak bisa pulang untuk ikut dalam proses pemilihan. Saya yang bekerja di luar negeri merasakan dilema antara kewajiban pekerjaan dan partisipasi dalam proses demokrasi. Terkadang pula mas, sulit untuk mengakses informasi terkait prosedur pemilihan atau melakukan pemungutan suara di luar negeri” (Arifin, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah terkait dengan adanya golput teknis-politis di wilayah Kelurahan Purwodadi. Penyebabnya dapat ditarik pada masyarakat yang bekerja di luar daerah dan memiliki keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pemilihan di luar daerah tersebut. Akibatnya, perilaku para pemilih yang berada di luar daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai golput. Kondisi ini menunjukkan bahwa golput terjadi karena faktor teknis-politis yang melibatkan situasi di mana masyarakat yang tinggal di luar daerah tidak sepenuhnya memahami atau terbatas dalam pengetahuan mereka mengenai prosedur dan aturan pemilihan di luar daerah. Hal ini memengaruhi partisipasi pemilih dan dapat mengakibatkan tingginya tingkat golput di antara mereka yang bekerja atau tinggal di luar wilayah tempat tinggal mereka namun terdaftar sebagai pemilih.

2. Golput politis yang terjadi di Kelurahan Purwodadi

Terdapat kelompok golput politis yang cenderung menunjukkan pandangan skeptis terhadap manfaat yang mungkin didapat dari keterlibatan dalam pemilihan umum. Mereka mungkin percaya bahwa pemilu tidak secara signifikan akan menghasilkan perubahan substansial atau mereka meragukan kemampuan calon untuk memenuhi harapan masyarakat atau memperbaiki kondisi yang ada. Sebagian dari mereka juga mungkin merasa bahwa kandidat yang tersedia tidak sepenuhnya mencerminkan nilai atau prinsip yang diyakini oleh golongan tersebut, sehingga hal ini memengaruhi keputusan mereka untuk tidak menggunakan hak suara mereka. Golongan golput politis terdiri dari individu yang memiliki pandangan skeptis terhadap manfaat yang bisa diperoleh dari partisipasi dalam pemilihan umum. Mereka bisa merasa bahwa pemilu tidak akan memberikan perubahan yang signifikan atau meragukan kemampuan calon untuk memenuhi harapan publik atau memperbaiki kondisi yang ada. Beberapa dari mereka juga mungkin merasa bahwa kandidat yang tersedia tidak sepenuhnya mencerminkan nilai atau prinsip yang diyakini oleh kelompok tersebut, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan mereka untuk tidak menggunakan hak suara.

Dalam konteks golongan yang enggan memilih dalam urusan politik, perilaku tersebut didasarkan pada sikap skeptis terhadap dunia politik. Menurut pandangan mereka, partisipasi dalam proses politik tidak memberikan dampak signifikan pada kehidupan individu, sehingga mereka merasa tidak perlu terlibat. Namun, hal ini menjadi pandangan yang tidak beralasan karena partisipasi seorang pemilih memiliki pengaruh besar terhadap pemilihan seorang calon. Sebagian dari mereka yang enggan memilih didasari oleh prinsip yang berbeda dengan calon yang tersedia. Ketidakinginan

untuk menggunakan hak pilihnya seringkali berasal dari adanya nilai-nilai atau prinsip yang mempengaruhi keputusan mereka, sehingga mereka menolak untuk memberikan suara kepada calon yang tidak sesuai dengan prinsip yang mereka anut.

Dalam wawancara peneliti dengan Mbak Anisa, dia memiliki kepercayaan yang rendah terhadap pemerintahan, dimana pemerintah sendiri kurang adanya keterbukaan informasi terhadap publik. Berikut wawancara dengan Mbak Anisa:

“Dari saya pribadi ya mas, saya kurang percaya terhadap pemerintahan sebab saat ini banyak kasus korupsi yang banyak sekali dilakukan dalam pemerintahan kan, dan juga mas saya rasa keterbukaan informasi itu masih sangat minim bagi saya antara pemerintah dan juga masyarakat terutama, sedangkan kita juga ingin mengetahui hal yang sifatnya data atau informasi yang pasti dalam pembangunan di pemerintahan kan mas” (Anisa, 2023).

Dari hal ini dapat dilihat bahwa terdapat golput politis di Kelurahan Purwodadi, dimana adanya sikap ketidakpercayaan individu terhadap pemerintahan sendiri, hal ini menjadikan pengaruh bagi para pemilih dalam menentukan pilihan mereka, sebab keterbukaan informasi merupakan hal yang dapat menjadikan sebuah kepercayaan publik terhadap pemerintahan sendiri. Dilain sisi juga adanya Pak Saroni menyampaikan bahwa adanya sikap skeptis didalam masyarakat Purwodadi, berikut hasil wawancara tersebut:

“Setiap masyarakat memiliki peran penting dalam Pilkada di daerahnya masing-masing, sebab suara mereka adalah hal yang dapat mengubah bagaimana daerah mereka kedepannya. Bagi masyarakat yang acuh memang pasti ada di setiap tempat ataupun di setiap terjadinya pemilihan umum, tidak bisa dipungkiri ya mas, masyarakat yang acuh tersebut mungkin berpandangan bahwa politik atau pemilu itu gk ngerubah hidup mereka, padahal secara tidak langsung mereka mendapatkan pelayanan terhadap apa yang mereka pilih nantinya kan ya mas” (Saroni, 2023).

Memang pada dasarnya hasil wawancara ini dalam menyikapi mereka yang skeptis ataupun memang acuh pada politik, tak dapat dipungkiri setiap daerah sendiri memiliki individu yang beranggapan bahwa pemilihan tidak berpengaruh terhadap apa yang ada didalam kehidupan mereka, sedangkan kenyataannya konsep berpolitik itu sendiri ada sejak mereka dilahirkan. Seperti adanya sebuah hubungan dalam permainan sepakbola, dimana tim satu sama lainnya saling sepakat akan adanya aturan didalam permainan sepak bola. Hal ini juga berlaku bagi setiap keluarga adanya aturan atau

hukum konvensi yang merupakan hukum tidak tertulis namun menjadi peraturan didalam sebuah keluarga itu sendiri.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Mas Gunawan selaku masyarakat Kelurahan Purwodadi, dimana dirinya kurang percaya terhadap pemerintahan dikarenakan adanya jalanan antar daerah yang mengalami kerusakan, yang mereka berfikir hal tersebut percuma saja ketika dirinya ikut pemilihan sebab tidak terjadinya perubahan. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Memang mas, saya waktu itu memilih berdasarkan dengan apa teman-teman yang saya pilih, dilain sisi kita memilih golput karena ya adanya sikap kurang percaya terhadap kepemilih saat itu, dimana hanya satu calon saat itu yang mencalonkan diri, dan juga dari yang kita lihat mas banyaknya jalan antar daerah yang kurang mendapat penanganan yang membuat teman saya terjatuh saat itu” (Gunawan, 2023).

Terdapat individu-individu di Kelurahan Purwodadi yang tergolong sebagai golput politis, yang terjadi akibat berbagai faktor. Salah satunya adalah ketidakpercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap calon yang tersedia untuk dipilih, yang menghasilkan sikap skeptisisme di antara pemilih. Hal ini juga dikarenakan ada kecenderungan untuk enggan memilih, terutama saat situasi menunjukkan bahwa hasil pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 di Kabupaten Grobogan hanya memiliki satu calon yang tersedia. Sikap golput politis ini merupakan hasil dari kombinasi antara ketidakpercayaan terhadap calon yang ada, serta sikap menolak untuk berpartisipasi dalam pemilihan karena dianggap sudah dipastikan siapa yang akan terpilih dalam kondisi di mana hanya terdapat satu calon. Hal ini menunjukkan adanya dampak dari situasi politik yang membuat sebagian masyarakat merasa ragu atau tidak termotivasi untuk ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah.

3. Golput ideologis yang terjadi di Kelurahan Purwodadi

Golongan pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya seringkali didasarkan pada pandangan ideologis yang mereka yakini. Keputusan ini sering kali terkait dengan keyakinan yang kuat terhadap prinsip-prinsip agama atau alasan-alasan ideologis yang mendalam. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk tidak menggunakan hak pilih juga dapat dipengaruhi oleh sikap dasar yang tercermin dari nilai-nilai yang dipegang teguh, baik dalam konteks agama maupun ideologi lainnya. Para pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya seringkali mempertimbangkan pandangan ideologis yang mereka anut sebagai landasan utama dalam membuat keputusan tersebut. Kaitannya erat dengan prinsip-prinsip agama yang

diyakini atau alasan-alasan ideologis yang mendalam yang menjadi pijakan dalam menentukan langkah politik mereka. Keputusan untuk tidak ikut serta dalam pemilihan sering kali merupakan cerminan dari kesetiaan pada nilai-nilai yang diyakini, baik yang berasal dari keyakinan agama maupun ideologi yang mereka anut.

Hasil wawancara dengan Mas Rizal dimana ideologi atau gagasan yang dimiliki antara pemilih dan calon pemimpin merupakan hal dapat menjadikan seseorang golput, dimana ketikan adanya kesamaan gagasan dalam sebuah pemilihan memiliki kemungkinan bahwa individu tersebut kemungkinan dapat memilih calon tersebut, namun apabila sebaliknya seorang pemimpin yang memiliki ideologi yang berbeda dengan pemilih dapat memungkinkan seorang pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Mas Rizal sebagai masyarakat:

“Kesamaan pandangan mengenai harapan-harapan yang di janjikan dalam kampanye memang dapat menjadikan pemilih cenderung memilih calon tersebut mas, namun dilain sisi adanya rasa ketidakcocokan harapan yang diberikan kepada pemilih juga dapat menjadikan masyarakat memilih untuk melakukan golput” (Rizal, 2023).

Selain itu mas Rizal juga menambahkan pendapatnya dengan adanya sikap ketidapedulian masyarakat terhadap adanya politik, berikut hasil wawancara tersebut:

“Selain itu, dari pandangan saya ya mas, sebagai masyarakat terutama kalo saya pikir dan lihat memang banyak masyarakat yang tidak melihat dengan adanya visi dan misi pasangan calon, namun ketikan mereka bersosialisasi dimana ketika kata orang itu calon yang bagus dirinya akan memilih calon tersebut” (Rizal, 2023).

Dilain sisi hasil wawancara Pak Saroni selaku ketua PPS di Kelurahan Purwodadi, dimana program yang diberikan dapat berpengaruh dalam preferensi seorang pemilih didalam pemilu untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Sebagian besar dari masyarakat pasti akan melihat kebijakan apa yang akan dibuat oleh calon pemimpin, masyarakat yang memilih untuk golput juga melakukannya bukan karena mereka tidak peduli dengan proses demokrasi. Sebaliknya, keputusan tersebut berkaitan dengan kebijakan yang diprioritaskan oleh para kandidat yang bertarung. Masyarakat merasa bahwa program-program yang diusung tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan serta aspirasinya sebagai bagian dari masyarakat” (Saroni, 2023).

Ditarik kesimpulan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menyoroti adanya perbedaan gagasan dan program yang tidak memenuhi ekspektasi pemilih, yang berujung pada munculnya golongan masyarakat yang termasuk dalam kategori golongan putih atau golput ideologis di Kelurahan Purwodadi. Hal ini terjadi karena pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Grobogan, hanya terdapat satu calon yang tersedia, sehingga preferensi dan harapan terhadap gagasan serta ide yang akan menjadi dasar program bagi pemimpin tersebut sangat terbatas. Selain itu, ketidakcocokan antara harapan pemilih dengan para calon yang akan menjadi pemimpin di masa depan juga turut menjadi faktor penting dalam konteks ini. Disamping itu, ketidaksesuaian antara harapan pemilih dengan visi serta program-program yang ditawarkan oleh calon pemimpin menjadi faktor yang signifikan dalam menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakterwakilan ideologis dalam proses pemilihan.

Dengan demikian hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan dimana adanya golput di Kelurahan Purwodadi mengindikasikan lebih banyak disebabkan oleh golput teknis, sebab masyarakat memiliki ketakutan dengan adanya pandemi Covid-19 disaat Pilkada 2020 berlangsung. Selain itu adapula masyarakat yang terjangkit karena adanya Covid-19 dimana dirinya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun jenis golput kedua ialah golput politis, yang dimana memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintahan. Selain itu mereka berpandangan bahwa pada pilkada 2020 tersebut tentu sudah pasti calon tunggal yang menang dalam pemilihan Pilkada 2020 tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas yang dimana mengenai non-voting behavior pada pemilih di Kelurahan Purwodadi, dimana sebagian besar utama dari adanya perilaku tidak memilih dalam hal ini diakibatkan dengan peristiwa pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Tingginya angka golput di Kelurahan Purwodadi juga dipengaruhi karena sikap skeptis terhadap politik itu sendiri, dimana masyarakat masih beranggapan bahwa pemilihan ini tidak mengubah kehidupan dirinya. Hal tersebut pula menjadikan individu ataupun pemilih di Kelurahan Purwodadi untuk bersikap rasional dengan nilai dan juga preferensi yang mereka miliki dengan sadar untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Terdapat dua karakteristik pilihan rasionalitas yang dimiliki oleh warga Kelurahan Purwodadi dalam bersikap rasional untuk tidak memilih dalam Pilkada 2020. Karakteristik pemilih rasionalitas teknis dimana tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan karena adanya masyarakat yang tidak patuh dengan aturan Kemenkes dalam pelaksanaan Pilkada 2020, yang menjadikan pemilih lainnya merasa takut akan tertularnya virus. Adanya karakteristik rasionalitas ekonomi dalam perilaku tidak memilih dalam Pilkada 2020 di Kelurahan Purwodadi didasari karena adanya pekerjaan yang lebih penting ketimbang dengan adanya pemilu, sebab mereka harus mengeluarkan biaya lebih saat melakukan pemilihan di kampung halamannya. Serta adanya sikap irasionalitas didalam perilaku tidak memilih pada pilkada 2020 di Kelurahan Purwodadi, dimana adanya sikap enggan memilih dikarenakan mengikuti teman maupun keluarga yang memiliki kedekatan dengan pemilih.

Terdapat faktor yang mempengaruhi masyarakat Kelurahan Purwodadi dalam berperilaku tidak memilih pada Pilkada 2020. Dimana adanya faktor demografi yang memang tidak terlepas dari adanya perilaku golput di masyarakat, pada faktor ini terdapat aspek yang menjadi pengaruh didalam perilaku tidak memilih di masyarakat, seperti adanya umur dan juga pekerjaan yang merupakan aspek paling berpengaruh dalam faktor demografi. Kemudian adanya faktor sosial yang menjadi penyebab perilaku tidak memilih di masyarakat, aspek yang paling dominan pada saat itu adalah lingkungan yang dimana terjadinya pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat takut dan malas untuk keluar rumah, serta adanya faktor solidaritas kelompok yang menjadi faktor tidak memilih dalam aspek sosial. Faktor psikologi sendiri berperan didalam partisipasi politik masyarakat, hal ini menandakan adanya aspek yang mempengaruhi individu memilih golput dalam Pilkada

2020, dimana dalam hal ini aspek kepercayaan terhadap politik merupakan hal yang paling dominan pada faktor psikologi. Adanya minim kepercayaan masyarakat terhadap para calon menjadikan mereka untuk memilih tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, sebab terjadinya kekecewaan terhadap memenuhi janji-janji politik yang calon berikan kepada masyarakat. Terdapatnya faktor karakteristik khusus pemilu dalam pengaruh perilaku tidak memilih di masyarakat Kelurahan Purwodadi, dalam hal ini adanya preferensi ataupun pandangan yang berbeda antara calon dan juga masyarakat menjadi pengaruh didalam faktor karakteristik khusus ini, dimana ketika adanya perbedaan pandangan tersebut dapat menyebabkan pemilih untuk enggan memilih calon tersebut ataupun tidak menggunakan hak suaranya.

Pada perilaku pemilih di Kelurahan Purwodadi terdapat empat jenis golput, dimana masyarakat di Kelurahan Purwodadi cenderung masuk kedalam golput teknis, karena alasan mereka adanya pandemi Covid-19 dan juga adanya pemilih yang kurang memiliki informasi mengenai pemilihan diluar daerah yang menjadikan adanya masalah administratif pada saat pemilihan. Golput politis juga menjadi penyumbang dalam masalah tingginya tingkat golput di Kelurahan Purwodadi, dimana hal ini disebabkan akibat adanya sikap skeptis seorang individu terhadap sebuah sistem politik maupun saat adanya pemilihan. Kemudian adanya golput ideologis terjadi di masyarakat Kelurahan Purwodadi karena adanya ketidakpuasan maupun perbedaan pandangan serta nilai-nilai yang ada pada pasangan calon dan pemilih, hal tersebutlah yang menjadikan pemilih jenis golput ideologis tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pilkada 2020.

B. SARAN

Peneliti sadar masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, dalam keterbatasan waktu, dana, maupun akses terhadap sumber daya yang diperlukan dalam penelitian dan juga kemampuan peneliti dalam penulisan serta pengelolaan data yang telah didapatkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penelitian serupa yang memiliki topik yang sama, serta dapat memperluas berbagai subjek yang berbeda pada penelitian selanjutnya. Bagi para pemilih agar adanya kepedulian diri sendiri dengan adanya politik di Indonesia, agar terciptanya kegiatan politik adil, transparan, serta bertanggung jawab kedepannya, dan juga untuk pihak terkait dapat membantu sebagai bahan evaluasi terhadap adanya tingkat golput yang tinggi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. (2020). *Tekan Golput di Pilkada Grobogan, Relawan Demokrasi Diterjunkan*. Muria News. Grobogan: murianews.com. Retrieved April 02, 2023, from <https://www.murianews.com/2020/08/24/194042/tekan-golput-di-pilkada-grobogan-relawan-demokrasi-diterjunkan>
- Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah. (2018). *Kepercayaan Politik dan Partispasi Politik Pemilih Pemula*.
- Alhafizh, Y. (2017). *Perilaku Golput Pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016*.
- Amadae, S. (2016, November 02). *teori pilihan rasional*. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/money/topic/rational-choice-theory>
- AndraFarm. (2023, 12 18). *Tabel seputar perkembangan COVID-19 (virus Corona) seluruh Provinsi Jawa Tengah per hari sampai 18 Desember 2023*. Retrieved from AndraFarm.com: https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-kota&noneg=97-10&urut=1&asc=01100000000
- Anisa. (2023, November 10). Mbak. (Riqi, Interviewer)
- Arba. (2023, September 23). Pak. (Riqi, Interviewer)
- Arianto, B. (2011). ANALISIS PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK MEMILIH DALAM PEMILU. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*.
- Arifin. (2023, November 21). Mas. (Riqi, Interviewer)
- BPS. (2021). *Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan (Jiwa), 2014-2021*. Retrieved from BADAN PUSAT STASTISTIK GROBOGAN: <https://grobogankab.bps.go.id/indicator/12/152/1/kepadatan-penduduk-kabupaten-grobogan.html>
- Coleman, J. S. (2011). *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundations of Social Theory*. Bandung: Nusa Media.
- Deyani. (2023, September 23). Ibu. (Riqi, Interviewer)
- Dian. (2023, Oktober 25). Mas. (Riqi, Interviewer)
- Diesing, P. (1962). *Reason in Society*. Urbana: University of Illinois Press.
- Efriza. (2012). *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta cv.
- Fadillah, H. (2015). *GOLONGAN PUTIH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU DI DESA BATURIJAL HULU KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2013* . *Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau* .

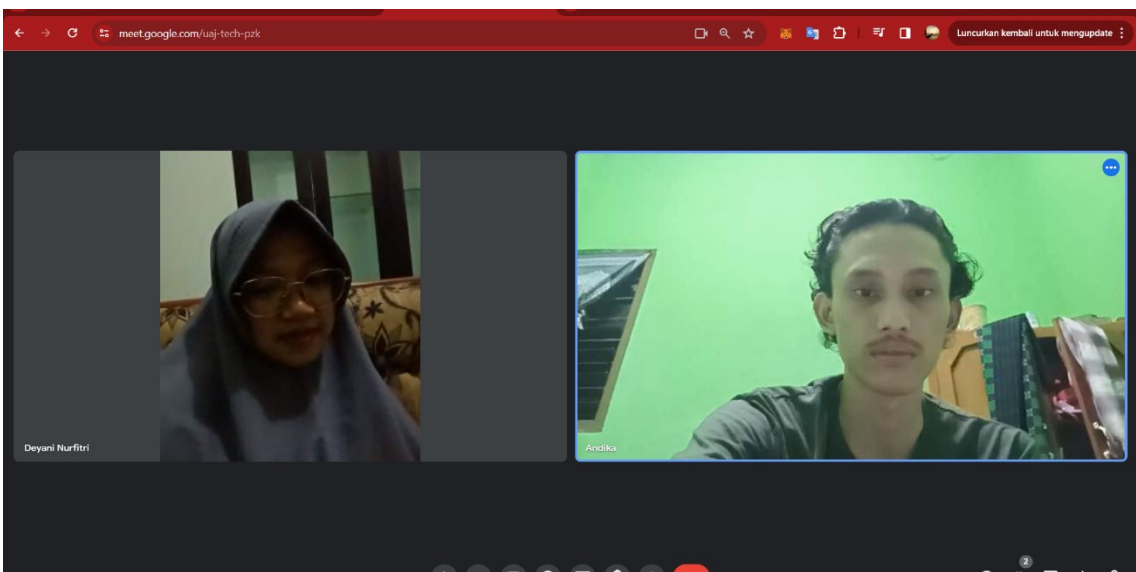
- Fauzie, R. (2013). FAKTOR PSIKOLOGIS YANG MEMPENGARUHI PERILAKU TIDAK MEMILIH (NON-VOTING BEHAVIOR) PADA PEMILIHAN GUBERNUR. *Journal of Psychology*.
- Fazalani, L. A., & Prihatmoko, J. J. (2022, September). PERILAKU MEMILIH PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KOTA SEMARANG TAHUN 2020. *Jurnal Lanskap Politik*, 01.
- Grobogan, B. P. (2023). *Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2023*. Grobogan: BPS Kabupaten Grobogan.
- Grobogan, D. K. (2023, November 14). *BANK DATA*. Retrieved from DISPENDUKCAPIL: <https://dispendukcapil.grobogan.go.id/bankdata>
- Grobogan, P. K. (2011, April 04). *Pemerintah Kabupaten Grobogan*. Retrieved April 11, 2023, from Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan: <https://www.grobogan.go.id/>
- Gunawan. (2023, Desember 4). Mas. (Riqi, Interviewer)
- Harahap, N. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Harpinsyah, & Kusuma, H. P. (2021). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT GOLPUT MASYARAKAT PADA PEMILUKADA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 DI KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*.
- Jatengdaily. (2020). *Empat Kabupaten di Jateng Masuk Kategori Partisipasi Pemilih di Pilkada Tertinggi*. Semarang: Jatengdaily.com. Retrieved from <https://jatengdaily.com/2020/empat-kabupaten-di-jateng-masuk-kategori-partisi-pemilih-di-pilkada-tertinggi/>
- Jati, W. R. (2023). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*.
- Karsyah, L., Asrinaldi, & Zetra, A. (2019). GOLPUT TERDIDIK PADA PILKADA TAHUN 2015 DI KABUPATEN SIJUNJUNG. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- KPU. (2020). *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara*.
- KPU. (2023, November 22). *Pindah Memilih*. Retrieved from Komisi Pemilihan Umum: <https://www.kpu.go.id/page/read/1135/pindah-memilih>
- Lestari, D. A. (2022). ANALISIS GOLONGAN PUTIH PADA MASYARAKAT KELAS BAWAH DI KECAMATAN DUKUN PADA PILKADA GRESIK 2020. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mutmainah, N., & Sobari, W. (2022). Perilaku Tidak Memilih Anggota Persatuan Istri Tentara (Persit) Pada Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020. *Brawijaya Journal of Social Science*.
- Nazir, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

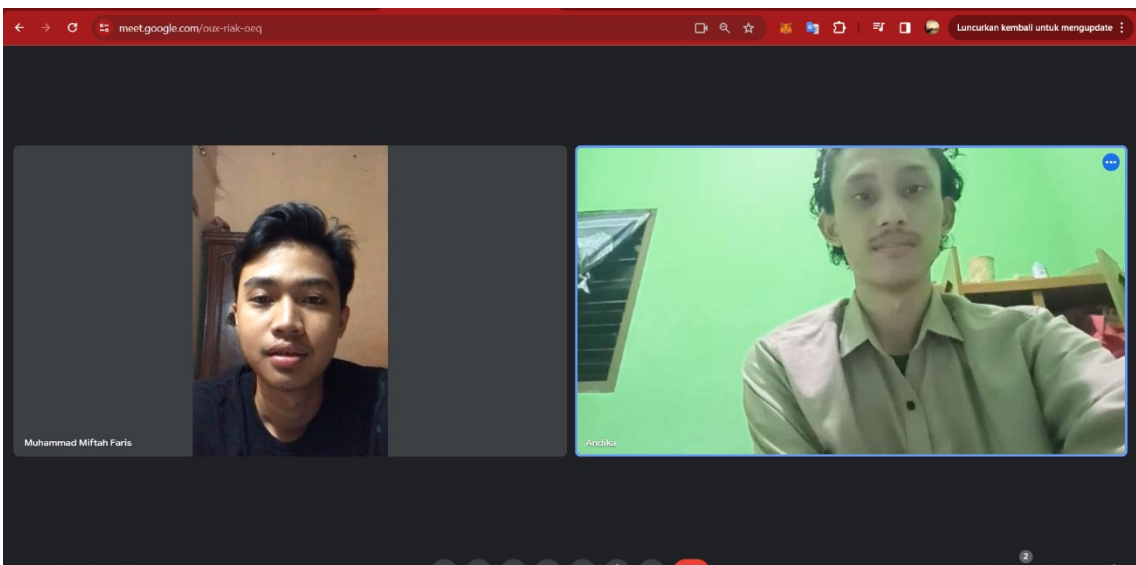
- Octavia, I. (2022). ANALISIS PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.
- Ode, S., Dalupe, B., Regif, S. Y., & Jannah, D. A. (2022, Juli). Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020. *Journal of Political Issues*.
- Pemerintah Kabupaten Grobogan. (2020, September 05). *info*. Retrieved from grobogan.go.id: <https://www.grobogan.go.id/info/berita-terbaru/2052-kpu-grobogan-mulai-buka-pendaftaran-pasangan-calon-untuk-pilkada-2020>
- Pemerintah Kabupaten Grobogan. (2022, Juni 09). *Pejabat Daerah*. Retrieved from Pemerintah Kabupaten Grobogan: <https://www.grobogan.go.id/pemerintahan/pejabat-daerah/bupati-dan-wakil-bupati>
- Pemerintah Kabupaten Grobogan. (2022, Juni 09). *Pejabat Daerah*. Retrieved from Pemerintah: <https://www.grobogan.go.id/pemerintahan/pejabat-daerah/wakil-bupati>
- Pratiwi, S. M., Purnamasari, H., & Marsingga, P. (2022). Perilaku Politik Pemilih di Desa Ciptamargi Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang pada Pilkada 2020 Studi Kasus di TPS 02 Desa Ciptamargi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Purwodadi, K. S. (2020). Kecamatan Purwodadi Dalam Angka 2020. Purwodadi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.
- Ragsdale, L., & Rusk, J. G. (1993, Agustus). Who Are Nonvoters? Profiles from the 1990 Senate Elections. *American Journal of Political Science*.
- Razak, R. (2020). ANALISIS PERILAKU PEMILIH GENERASI MILENIAL DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2018 DI SULAWESI SELATAN.
- Rizal. (2023, Oktober 25). Mas. (Riqi, Interviewer)
- Sarono. (2023, Oktober 18). Pak. (Riqi, Interviewer)
- Simbala, S. S., Lopian, M. T., & Niode, B. (2022). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketidaksiertaan Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif Bolang Mongondow Timur Tahun 2019 Kecamatan Nuangan. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tele, M. (2022). ANALISIS PENYEBAB GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2020. 33.
- Ubaid, A. H., & Subandi, H. H. (2022). PERILAKU MEMILIH DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR: STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA MEDAN 2020. *Jurnal Wacana Politik*.
- Widi, S. (2022, Desember 15). *Data Pemilih Golput saat Pemilu, Turun Drastis pada 2019*. Retrieved from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/data-pemilih-golput-saat-pemilu-turun-drastis-pada-2019>

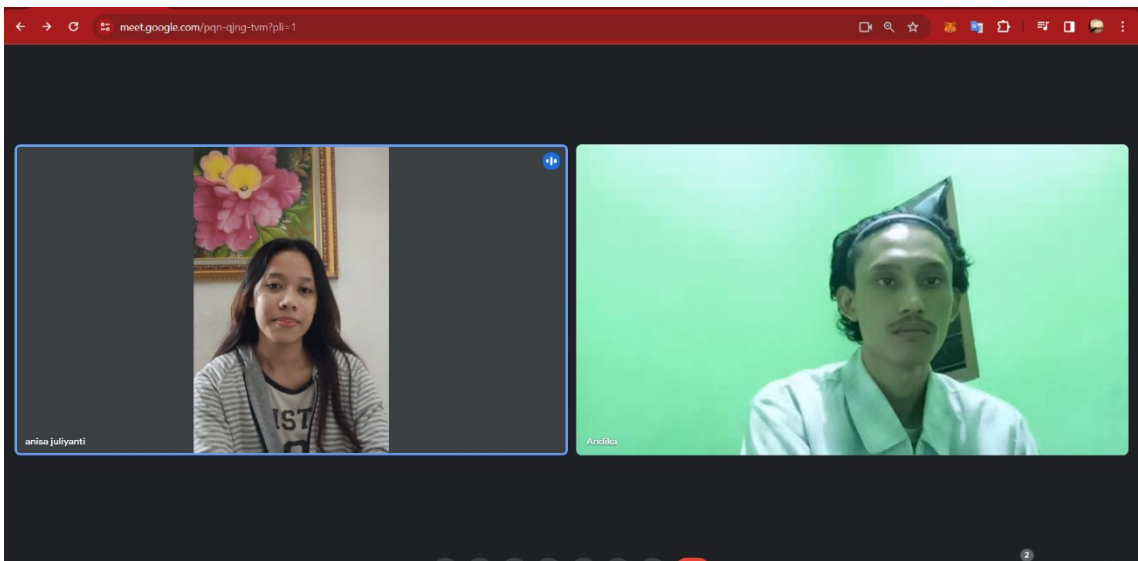
92-LAMPIRAN

A. Wawancara










B. Dokumen



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model
D. HASIL
KABUPATEN/KOTA -
KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*) : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

Pada hari ini RABU tanggal ENAM BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH, pukul 09.00 WIB, KPU Kabupaten GROBOGAN mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di : BALLROOM FIRDAUSIA, KYRIAD GRAND MASTER HOTEL PURWODADI

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten GROBOGAN untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

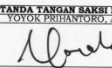
Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (Lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	2	3	4	5
AGUNG SUTOPO, S.P.	MUHAMMAD MACHRUZ, ST	NGATIMAN, SE	SUWIKNYO, S. Pd. I	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
YOTOK PRIHANTORO, A. Mg



KABUPATEN/KOTA*) : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

Model
D. HASIL KABUPATEN/KOTA -
KWK
Halaman 2-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	KECAMATAN																JUMLAH PILIHAN		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
I. DATA PEMILIH DAN PERGUNAAN HAK PILIH																				
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)		LK	16.733	38.148	24.521	44.641	28.862	41.808	31.911	29.233	27.104	58.888	22.022	29.292	30.841	19.208	14.704			452.922
		PR	16.965	38.390	25.463	45.873	29.834	41.784	33.155	29.937	26.432	55.911	21.922	29.482	32.528	19.379	14.821			457.416
		JML	33.698	76.538	50.984	90.514	58.696	83.592	65.066	58.170	53.536	114.799	43.944	58.774	63.369	38.587	29.525			910.338
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)		LK	13	4	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		PR	11	11	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
		JML	24	15	0	2	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTB)		LK	8	0	18	18	8	12	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
		PR	8	0	14	21	8	15	7	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241
		JML	16	0	32	39	16	27	14	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		LK	16.753	38.158	24.521	44.660	28.870	41.809	31.912	29.233	27.111	58.888	22.022	29.292	30.841	19.208	14.712			453.141
		PR	16.984	38.402	25.472	45.887	29.842	41.790	33.156	29.938	26.444	55.924	21.924	29.482	32.529	19.388	14.831			457.647
		JML	33.737	76.560	50.993	90.547	58.712	83.599	65.068	58.172	53.536	114.812	43.948	58.774	63.369	38.597	29.525			910.788
B. PENGGUNAAN HAK PILIH																				
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		LK	9.085	17.208	11.906	23.868	14.180	21.267	15.113	18.278	17.252	29.329	13.611	16.704	29.427	12.018	7.811			244.333
		PR	12.387	25.636	16.233	34.235	19.344	26.763	21.763	22.746	21.636	26.968	17.717	22.428	35.115	14.802	10.446			338.566
		JML	21.472	42.844	28.139	58.103	33.524	48.030	36.876	41.024	38.888	56.297	31.328	39.132	64.542	26.820	18.257			582.899
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya		LK	13	4	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
		PR	11	11	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
		JML	24	15	0	2	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTB)		LK	8	0	18	18	8	12	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
		PR	8	0	14	21	8	15	7	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241
		JML	16	0	32	39	16	27	14	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	9.105	17.208	11.916	23.882	14.186	21.282	15.114	18.292	17.262	29.340	13.613	16.712	29.429	12.023	7.815			244.622
		PR	12.374	25.636	16.241	34.239	19.350	26.778	21.774	22.772	21.648	26.981	17.728	22.427	35.120	14.811	10.453			338.904
		JML	21.479	42.844	28.157	58.121	33.536	48.060	36.934	41.064	38.930	56.321	31.341	39.149	64.542	26.834	18.268			583.526

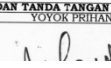
II. DATA PEMILIH DISABILITAS

NO.	URAIAN	KECAMATAN																JUMLAH PILIHAN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK	84	58	23	66	119	10	20	18	40	39	20	41	31	44	21	63	38	20	721
		PR	74	63	10	44	131	21	26	20	41	31	44	21	63	38	21	76	31	1.080	1.801
		JML	158	121	33	110	250	31	46	38	81	70	64	62	94	69	42	114	69	1.181	2.522
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	21	7	0	12	30	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184
		PR	18	7	0	10	28	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
		JML	39	14	0	22	58	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	2	3	4	5
AGUNG SUTOPO, S.P.	MUHAMMAD MACHRUZ, ST	NGATIMAN, SE	SUWIKNYO, S. Pd. I	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
YOTOK PRIHANTORO, A. Mg



C. Draft Wawancara

1. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi faktor utama dalam memengaruhi masyarakat kelurahan purwodadi untuk memutuskan golput?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana mengenai masyarakat yang kurang mengerti politik atau tidak mendapat informasi mengenai adanya pemilu?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor masyarakat yang acuh terhadap pemilihan di kelurahan Purwodadi?
4. Lalu dari yang saya lihat data dilapangan, terdapat calon tunggal dalam pilkada sebelumnya apakah hal tersebut berpengaruh terhadap sikap golput di masyarakat kelurahan purwodadi?
5. Apakah terdapat masyarakat yang kurang puas mengenai calon ataupun kinerja sebelumnya dari calon dalam pemilihan?
6. Apakah ada masyarakat yang tidak memilih karena adanya masalah teknis dalam syarat menjadi pemilih atau DPT?
7. Lalu apakah ada masyarakat yang enggan memilih karena faktor dari demografi seperti adanya pemilih yang diluar kota atau negeri?
8. Menurut bapak apakah ada masyarakat yang golput dikarenakan faktor keluarga ataupun temannya yang tidak ikut memilih di lingkup kelurahan purwodadi?
9. Menurut bapak adakah masyarakat yang golput dikarenakan faktor pekerjaan?
10. Apakah ada pemilih yang sadar mengenai pentingnya berpartisipasi dalam sebuah pemilihan?
11. Apa langkah yang telah diambil oleh pemerintah sendiri untuk mendorong partisipasi dalam pemilihan umum?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Riqi Andika
Tempat & Tanggal Lahir : Grobogan, 20 Oktober 2000
Alamat Rumah : Jl.Pondok Kelapa Selatan Dalam RT 06
RW 12, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
No.Hp : 085780131623
Email : riqiandika97@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 06 Pondok Kelapa, Jakarta Timur
2. SMPN 213 Jakarta
3. SMAN 100 Jakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pramuka SMAN 100 Jakarta
2. Anggota PMII Rayon Fisip UIN Walisongo.
3. Pengurus PMII, Lembaga Sahabat Alam 2021-2022
4. Pengurus QAI 2021-2022
5. Pengurus FORSHA 2021-2022
6. Tenaga Ahli Sema Fisip 2021-2022

Semarang, 6 Desember 2023

Yang menyatakan,



Riqi Andika

NIM: 1906016029